

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2021-2026

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

JLN. RAYA PADANG PANJANG

Telp : (0739) 21797

www.dinkesbengkuluselatan.go.id

dinaskesehatan.bs2gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN

JL. RAYA PADANG PANJANG Telp. (0739) 21797

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR :028/69/UU/DINKES/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA PERUBAHAN)

DINAS KESEHATAN TAHUN 2022-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan rencana strategis, maka perlu dilakukan penggantian Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Nomor : 028/76/UU/DINKES/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
 - 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Kesehatan Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;

33. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026
- KESATU** : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 Tim Penyusun (Perubahan Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah Dokumen Perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkulu Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
- KETIGA** Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
- KEEMPAT** Sistematika Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS
KESEHATAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU
STRATEGIS DINAS KESEHATAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Ditetapkan di : Manna

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA DINAS



DIDI RUSLAN, SKM., M. Si

NIP. 19750827 199703 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Pelaksanaan Pembangunan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan termasuk pembangunan kesehatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan tahap kelima dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Selatan disamping berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan juga memperhatikan Renstra Kementerian serta Provinsi. Pada tahun 2022, dilakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Alasan adanya perubahan



renstra tersebut merupakan penyesuaian atas dokumen perencanaan yang menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima tahun. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas Berdasarkan Cinta BS”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi



- Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09).
15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar tersusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu lima tahun. Perubahan Renstra dijadikan salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program-program kesehatan untuk mencapai indikator-indikator bidang kesehatan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN dan sumber-sumber lain.
- b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;



- d. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur;
- e. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
- f. Menyelaraskan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kementerian Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas Berdasarkan Cinta BS”.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata cara penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan didasarkan pada pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “ Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang pengertian dan fungsi renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penyusunan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menjelaskan gambaran pelayanan dan informasi tentang tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan. Menjelaskan secara ringkas tugas dan fungsi, sumber daya yang



dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kinerja pelayanan berdasarkan hasil pelaksanaan Perubahan Renstra periode 2016-2021. Mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan isu-isu strategis dalam pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul serta sinkronisasi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah, rencana strategis Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan terkait pembangunan kesehatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang penjabaran visi Bupati, misi Bupati, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyajikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Menyajikan capaian kinerja melalui kegiatan penyelenggaraan bidang Kesehatan selama 5 (lima) tahun.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif. Perencanaan pembangunan yang tertuang salah satunya dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini dilakukan melalui lima pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; (2) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas. (3) Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. (4). pendekatan atas-bawah dan (5). bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bengkulu selatan nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kesehatan merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 16 (enam belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu: empat belas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 1 laboratorium kesehatan (labkesda) dan 1 instalansi Farmasi. Di Kabupaten Bengkulu Selatan juga terdapat 1 rumah sakit milik pemerintah yaitu Rumah Sakit Hasanuddin Damrah dan 1 rumah sakit milik swasta yaitu Rumah Sakit As-Syifa.



1. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan Kabupaten;

2. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Penyelenggara perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan.
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

4. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan satu sekretariat dan tiga bidang.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 39 tahun 2016, terdiri dari:

1). Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD).



- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang kesehatan serta pengelolaan sistem informasi.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan.
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2). Sekretariat

Sekretariat Dinas adalah unsur staf/pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok

Membantu kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran Dinas Kesehatan secara terpadu serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris dinas mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran dinas kesehatan;
- b. Pengolahan data dan informasi di bidang kesehatan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang kesehatan;
- d. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;



- e. Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- g. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- h. Pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan dinas;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang kesehatan;
- j. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum di bidang kesehatan;
- k. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- l. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian antara lain:

1. Sub Bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
- c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
- e. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;



- g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- j. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
- k. Koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, dan keuangan dinas.

b. Fungsi

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- c. Koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- d. Penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- e. Pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala;
- i. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dan anggaran dinas;



- j. Pengelolaan anggaran dinas;
- k. Penatausahaan administrasi keuangan dinas;
- l. Penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dinas secara berkala;
- m. Pengelolaan dan penatasusahaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- n. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sub bagian;
- p. Pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian keuangan dan pengelolaan barang milik daerah; dan
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3). Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan seksi yang berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;



- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Seksi :

1. Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

a. Tugas Pokok

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

b. Fungsi

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. Perencanaan Program kesehatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi Program Maternal, Program Neonatal, Program Balita/Prasekolah, Program Usia Sekolah/Remaja, Program Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program Pengelolaan Konsumsi Gizi;
- c. Pelaksanaan rencana program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat yang terdiri dari pelaksanaan Program Maternal, Program Neonatal, Program Balita/Prasekolah, Program Usia Sekolah/Remaja, Program Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program Pengelolaan Konsumsi Gizi;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat yang terdiri dari bimbingan teknis Program Maternal, Program Neonatal, Program Balita/Prasekolah, Program Usia Sekolah/Remaja, Program



Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program Pengelolaan Konsumsi Gizi;

- e. Pelaksanaan supervisi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat yang terdiri dari Program Maternal, Program Neonatal, Program Balita/Prasekolah, Program Usia Sekolah/Remaja, Program Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program Pengelolaan Konsumsi Gizi;
- f. Pemantauan pelaksanaan supervisi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat yang terdiri dari Program Maternal, Program Neonatal, Program Balita/Prasekolah, Program Usia Sekolah/Remaja, Program Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program Pengelolaan Konsumsi Gizi;

2. Seksi Promosi dan pemberdayaan masyarakat

a. Tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Fungsi

- a. Perencanaan program promosi kesehatan yang meliputi bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan
- b. Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta masyarakat
- c. Pelaksanaan program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan



- d. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan yang meliputi bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan
- f. Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta masyarakat
- g. Pemantauan pelaksanaan program promosi kesehatan yang meliputi bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan
- h. Pemantauan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta masyarakat;
- i. Pencatatan dan pelaporan program promosi kesehatan yang meliputi bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan;
- j. Pencatatan dan pelaporan program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta masyarakat;
- k. Pengevaluasian program promosi kesehatan yang meliputi bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan
- l. Pengevaluasian Program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



3. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

b. Fungsi

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; pelaksanaan rencana program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Perencanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar, program penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan pangan, program pengamanan limbah dan radiasi, program kesehatan kerja dan program olah raga berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Pelaksanaan rencana program penyehatan air dan sanitasi dasar, program penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan pangan, program pengaman limbah dan radiasi, program kesehatan kerja dan program Olah Raga agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan Bimbingan teknis Program Penyehatan air dan sanitasi dasar, Program Penyehatan Udara dan kawasan, Program Pengawasan Pangan, Program Pengamanan Limbah dan radiasi, Program kesehatan kerja dan Program Olah Raga;
- e. Pelaksanaan Suvervisi Program Penyehatan air dan sanitasi dasar, Program Penyehatan Udara Tanah dan kawasan, Program Pengawasan Pangan, Prog Pengamanan Limbah dan radiasi, Program kesehatan kerja dan Program Olah Raga;
- f. Pemantauan pelaksanaan Program Penyehatan air dan Program sanitasi dasar, Program Penyehatan Udara Tanah dan kawasan, Program Pengawasan Pangan, Proram Pengamanan Limba dan radiasi, Program Kesehatan kerja dan Olah raga;



- g. Pengevaluasian Pelaksanaan Program Penyehatan air dan sanitasi dasar, Program Penyehatan Udara Tanah dan kawasan, Program Pengawasan Pangan, Pengamanan Limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan Olah raga;
- h. Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penyehatan air dan sanitasi dasar, Program Penyehatan Udara Tanah dan kawasan, Program Pengawasan Pangan, Program Pengamanan Limbah dan radiasi, Program kerja dan Olah raga;
- i. Pengkoordinasian Lintas Program dan lintas sektor terkait Penyehatan air dan Program sanitasi dasar, Penyehatan Udara, Program Tanah dan kawasan, Pengawasan Pangan, Program Pengamanan Limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan Program Kesehatan Olah raga;
- j. Pembentukan dan Pembinaan wilayah sehat serta pemeliharaan Lingkungan;
- k. Pengevaluasian Pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olah raga;
- l. Penyusunan Laporan Pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan lingkungan Kesehatan kerja dan olah raga; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

4). Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit (P2P)

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) adalah pelaksana Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit yang dibantu oleh seksi yang berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit (P2P) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;



- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

a. Tugas

Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

b. Fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah serta penyakit infeksi emerging;
- c. Penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan dini, dan respon kejadian luar biasa dan wabah serta penyakit infeksi emerging;



- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah serta deeksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjtan dan khusus;
- h. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
- i. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang imunisasi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang imunisasi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
- k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi surveilans dan imunisasi;
- l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi surveilans dan imunisasi; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atassan.

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

a. Tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

b. Fungsi

- a. Penyusunan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, HIV AIDS dan penyakit Infeksi Menular Seksual, Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Pemyakit Tropis Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri dari



- malarian, zoonis, filariasis dan kecacingan, arbovirus vektor dan binatang pembawa penyakit;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, HIV AIDS dan penyakit Infeksi Menular Seksual, Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Penyakit Tropis Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri dari malaria, zoonis, filariasis dan kecacingan, arbovirus vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, HIV AIDS dan penyakit Infeksi Menular Seksual, Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Penyakit Tropis Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri dari malaria, zoonis, filariasis dan kecacingan, arbovirus vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, HIV AIDS dan penyakit Infeksi Menular Seksual, Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Penyakit Tropis Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri dari malaria, zoonis, filariasis dan kecacingan, arbovirus vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



c. Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

a. Tugas

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

b. Fungsi

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAFZA;
- c. Pelaksanaan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAFZA;
- e. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAFZA;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAFZA;



- g. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAFZA;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

5). Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan adalah pelaksana kegiatan Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang dibantu oleh seksi yang berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;



- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Pelayanan kesehatan

a. Tugas

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional;

b. Fungsi

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan manajemen Puskesmas, Manajemen Fasilitas Kesehatan lainnya (Klinik, DPM/Dokkel);
- c. Pemantauan/ Pengawasan Manajemen Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta);
- d. Pengelolaan Sistem Rujukan pelayanan Kesehatan;
- e. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris;
- f. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional Komplementer;
- g. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional Integrasi;
- h. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah DTPK;
- i. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Gigi dan Mulut;



- j. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Indera;
- k. Pelaksanaan Program JKN-KIS;
- l. Perumusan dan Pelaksanaan Program Jamkesda
- m. Integrasi BPJS;
- n. Pelaksanaan Koordinasi LP/LS Program Pelayanan Kesehatan Dasar (PMI, BPJS Dinas Sosial dan Biro Kesra);
- o. Pengelolaan Program Medis Dasar, Medis Spesialistik dan Media Keperawatan;
- p. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan;
- q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan; dan
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

b. Seksi Pelayanan kefarmasian, Alkes dan PKRT

a. Tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.

b. Fungsi

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi kefarmasian, alkes dan PKRT;
- b. Perumusan pelaksanaan kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT;
- c. Pelaksanaan kajian teknis dan rekomendasi pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK;
- d. Persetujuan dan rekomendasi pergantian pimpinan, penanggung jawab, penambahan atau perubahan gudang PBF dan PBF Cabang;
- e. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional;
- f. Penerbitan surat keterangan penyuluhan perusahaan rumah tangga Alkes dan PKRT;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap PBF dan PBF Cabang, PAK dan Cabang PAK;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan narkotika dan psikotropika terhadap unit layanan kab/kota;



- i. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan makanan minuman terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) dan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS);
- j. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Obat Rasional, UJG, UJR, UKOT, UMOT;
- k. Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Buffer Stock dan Obat Proram (TB. HIV. Malaria, Diare. Filariasis, Gizi, Vaksin, KIA, Farmakologi, keskin, kusta, hepatitis);
- l. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan obat buffer stock dan program;
- m. Pencatatan dan pelaporan obat buffer stock dan program;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi penggunaan obat rasional dan pelayanan kefarmasian;
- o. Pelaksanaan pengumpulan data, validasi data, dan pemutakhiran data terkait data kefarmasian tingkat kabupaten;
- p. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTK);
- q. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kefarmasian. Alkes dan PKRT;
- r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kefarmasian, alkes dan PKRT; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Tugas

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. perencanaan dan mengelola kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kesehatan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan diklat dan tenaga kesehatan sesuai dengan bidang ahlinya;



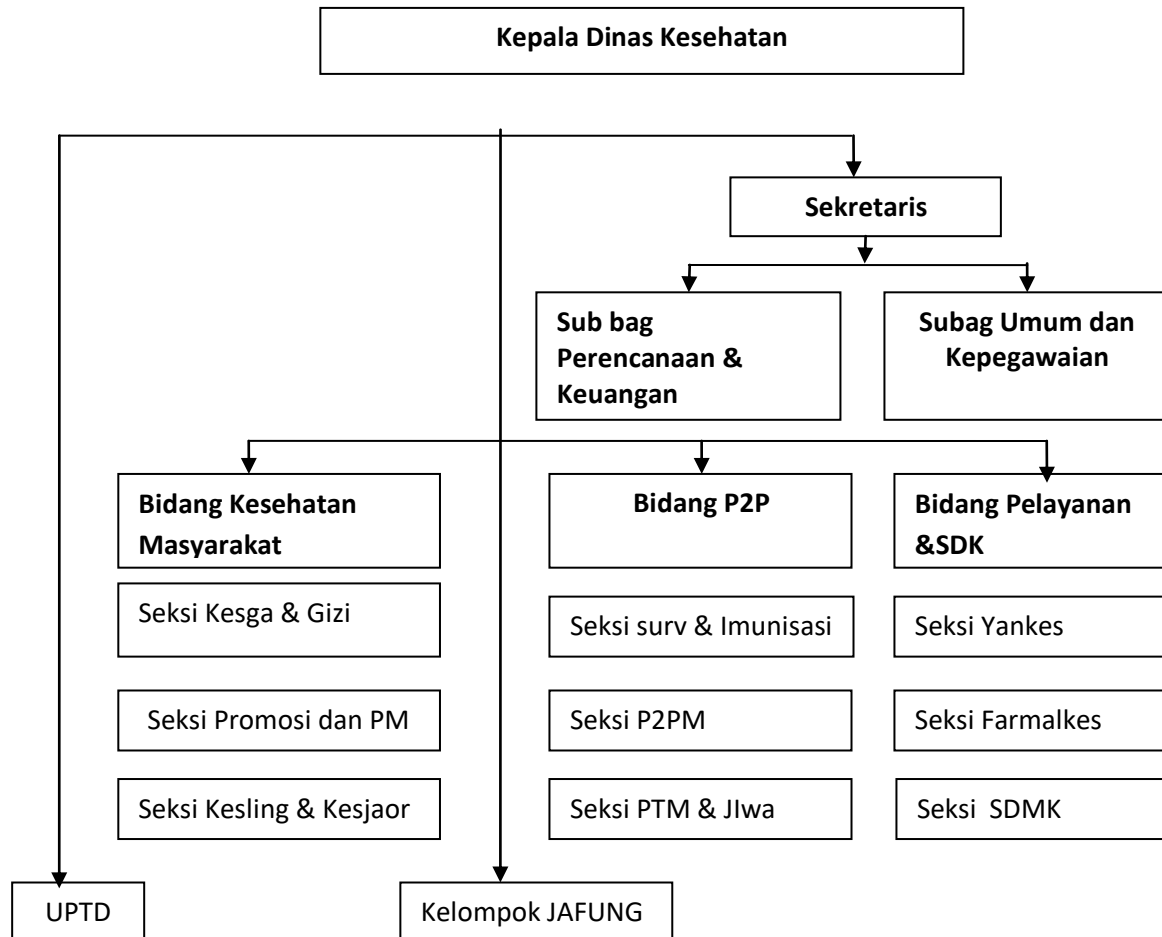
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- e. pelaksanaan bimbingan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat tenaga kesehatan;
- f. pengumpulan data, mengolah dan menganalisa serta menginformasikan hasil registrasi dan akreditasi dibidang kesehatan;
- g. pengelolaan mutu layanan di FKTP dan FKTL;
- h. pelaksanaan Akreditasi FKTP dan FKTL;
- i. pelaksanaan resgistrasi SDM Kesehatan
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

5). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.



Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Selatan



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, 2022



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Sarana Kesehatan

Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya puskesmas, rumah sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan, sarana upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), dan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

a. Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 14 puskesmas. Terdiri dari 5 puskesmas perawatan dan 9 puskesmas non perawatan. Dilihat dari Konsep wilayah, satu kecamatan memiliki 1 Puskesmas. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 sebanyak 11 Kecamatan, ada beberapa kecamatan mempunyai 2 unit Puskesmas. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencukupi dari segi ratio penduduk dan wilayah, tetapi ada beberapa desa jarak tempuh dan kondisi alam masih jauh bila ke Puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 berjumlah 41 pustu (Seksi SDMK, 2021).

Pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*) seperti Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu masih perlu untuk terus ditingkatkan. Puskesmas sebagai upaya pelayanan kesehatan yang menjadi kontak pertama pemberian layanan kesehatan masyarakat terutama kepada masyarakat yang hidup di daerah pelosok. Kondisi geografis yang sulit, transportasi dan atau infrastruktur yang belum tersedia dengan baik, tidak memadainya jumlah, jenis tenaga esensial yang tersedia dan menetap di fasilitas kesehatan yang ada, serta latar belakang sosial budaya, yang menjadi penyebab utama kesenjangan pelayanan kesehatan.

Akreditasi Puskesmas adalah Pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Komite Akreditasi) kepada Puskesmas setelah memenuhi standar akreditasi. Tujuan akreditasi salah satu adalah meningkatkan kinerja puskesmas dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat (UKP/UKM), yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkat Umur Harapan Hidup (UHH), Indek Pembangunan Manusia (IPM). Permenkes No 46 Tahun 2016 Pasal 2. Akreditasi memberikan jaminan kepada pelanggan/masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh puskesmas telah sesuai standar.



Di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 status Puskesmas dengan akreditasi sebanyak 14 puskesmas.

b. Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 2 unit, yaitu: Rumah Sakit milik Pemerintah sebanyak 1 unit yaitu Rumah Sakit Hasanuddin Damrah dan Rumah sakit milik swasta sebanyak 1 unit yaitu Rumah Sakit Assyifa.

c. Sarana kesehatan milik pemerintah

Table 2.2.1.c
Jumlah Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

No	Jenis Sarana	Jumlah	Persentase (%)
1	Rumah sakit umum	1	0.86
2	Dinas kesehatan	1	0.86
3	Puskesmas	14	12.17
4	Puskesmas pembantu	41	35.65
5	Poskesdes	56	48.69
6	Laboratorium daerah	1	0.86
7	Gudang farmasi	1	0.86
Jumlah		115	100

(Sumber: Seksi SDM Dinkes kab. Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Dari table diatas dapat diketahui bahwa fasilitas kesehatan terbanyak milik pemerintah daerah adalah poskesdes yaitu sebanyak 56 unit (48,6%), yang tersebar di seluruh desa di wilayah puskesmas kabupaten Bengkulu selatan, umumnya desa yang belum mempunyai sarana kesehatan seperti puskesmas atau puskesmas pembantu.



d. sarana kesehatan non pemerintah (milik swasta)

Table 2.2.1.d
Jumlah Sarana Kesehatan non Pemerintah
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

No	Jenis Sarana	Jumlah	Persentase (%)
1	Klinik bersalin	6	4.2
2	Apotek	14	9.8
3	Toko obat	2	1.4
4	Optic	4	2.8
5	Rumah sakit swasta	1	0.7
6	Klinik pratama	3	2.1
7	Laboratorium klinik	5	3.5
8	Praktek dokter spesialis	3	2.1
9	Praktek dokter umum	28	19.7
10	Praktek dokter gigi	5	3.5
11	Praktek bidan	71	50
Jumlah		142	100

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana kesehatan non pemerintah terbanyak adalah praktek bidan yaitu sebanyak 50%, kondisi ini erat kaitannya dengan banyaknya jumlah tenaga bidan sebagaimana table 2.2.1.d bahwa tenaga bidan merupakan jumlah tenaga dengan komposisi terbesar yaitu 50% dan seluruh tenaga kesehatan dilingkungan dinas kesehatan.



2. Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.a
Komposisi Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	103 orang	6.21
2	D1	9 orang	0.54
3	DIII	593 orang	35.77
4	DIV	340 orang	20.51
5	S1	264 orang	15.92
6	PROFESI	314 orang	18.94
7	S2	32 orang	1.93
8	S3	3 orang	0.18
Jumlah		1658 orang	100%

(Sumber: Seksi SDMK, Dinkes kab.Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori pendidikan DIII sebanyak 593 orang atau 35.77%, dan yang paling sedikit S3 sebanyak 3 orang atau 0.18 %.



Tabel 2.2.2.b
Komposisi Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Dinas Kesehatan
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	1 orang	1.18
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	20 orang	23.53
4	DIV	8 orang	9.41
5	S1	40 orang	47.06
6	Profesi	4 orang	4.71
7	S2	12 orang	14.12
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		85 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab.Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Dinas Kesehatan tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori pendidikan S1 sebanyak 40 orang atau 47.06% dan tidak ada ASN yang berpendidikan S3.



Tabel 2.2.2.c
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Kota Manna
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0 orang	0.00
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	52 orang	60.47
4	DIV	13 orang	15.11
5	S1	20 orang	23.26
6	Profesi	1 orang	1.16
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		86 orang	100%

(Sumber: Seksi SDMK Dinkes Kab.Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Puskesmas Kota Manna tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori pendidikan DIII sebanyak 52 orang atau 60.47% dan tidak ada ASN yang berpendidikan SMA, D1, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.d
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas M.Taha
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	1 orang	1.20
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	49 orang	59.04
4	DIV	13 orang	15.66
5	S1	13 orang	15.66
6	Profesi	6 orang	7.23
7	S2	1 orang	1.20
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		83 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab,Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Puskesmas M.taha tampak beragam mulai dari terendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori pendidikan DIII 49 orang atau 59.05% dan tidak ada ASN yang berpendidikan D1 dan S3.



Tabel 2.2.2.e
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Pasar Manna
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0 orang	0.00
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	28 orang	45.90
4	DIV	8 orang	13.11
5	S1	20 orang	32.79
6	Profesi	5 orang	8.19
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		61 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan dinas kesehatan pada Puskesmas Pasar Manna tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah pendidikan kategori DIII sebanyak 28 orang atau 45.90% dan tidak ada ASN yang berpendidikan SMA, D1, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.f
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Kayu Kunit
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	2 orang	2.13
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	53 orang	56.38
4	DIV	14 orang	14.89
5	S1	22 orang	23.40
6	Profesi	3 orang	3.19
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		94 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Kayu Kunit tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 53 orang atau 56.38% dan tidak ada yang berpendidikan DI, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.g
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Masat
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	1 orang	1.44
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	41 orang	59.42
4	DIV	7 orang	10.14
5	S1	13 orang	18.84
6	Profesi	6 orang	8.69
7	S2	1 orang	1.44
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		69 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas kesehatan Pada Puskesmas Masat tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori pendidikan DIII sebanyak 41 orang atau 59.42%, dan tidak ada ASN yang berpendidikan DI dan S3.



Tabel 2.2.2.h
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Anggut
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0 orang	0.00
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	27 orang	67.5
4	DIV	1 orang	2.50
5	S1	9 orang	22.5
6	Profesi	3 orang	7.50
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		40 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Anggut tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori pendidikan DIII 27 orang atau 67.5% dan tidak ada yang berpendidikan SMA, DI, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.i
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Seginim
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	4 orang	3,81
2	DI	2 orang	1.90
3	DIII	72 orang	68.57
4	DIV	8 orang	7.62
5	S1	9 orang	8.57
6	Profesi	10 orang	9.52
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		105 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab,Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Seginim tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori pendidikan DIII sebanyak 72 orang atau 68.57% dan tidak ada yang berpendidikan S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.j
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Kedurang
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	5 orang	7.81
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	45 orang	70.31
4	DIV	9 orang	14.06
5	S1	2 orang	3.13
6	Profesi	3 orang	4.69
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		64 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab,Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Kedurang tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 45 orang atau 70.31% dan tidak ada yang berpendidikan DI, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.k
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Talang Randai
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	2 orang	3.33
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	33 orang	55.00
4	DIV	9 orang	15.00
5	S1	2 orang	3.33
6	Profesi	3 orang	5.00
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		60 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab. Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Talang Randai tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 33 orang atau 55.00% dan tidak ada yang berpendidikan DI, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.1
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Sulau
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	2 orang	4.65
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	28 orang	65.12
4	DIV	1 orang	2.33
5	S1	6 orang	13.95
6	Profesi	5 orang	11.63
7	S2	1 orang	2.33
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		43 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Sulau tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 28 orang atau 65.12% dan tidak ada yang berpendidikan DI dan S3.



Tabel 2.2.2.m
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Palak Bengkerung
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0 orang	0.00
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	36 orang	67.92
4	DIV	1 orang	1.89
5	S1	7 orang	13.21
6	Profesi	8 orang	15.09
7	S2	1 orang	1.89
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		53 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Palak Bengkerung tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 36 orang atau 67.92% dan tidak ada yang berpendidikan SMA, DI dan S3.



Tabel 2.2.2.n
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Lubuk Tapi
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	3 orang	5.66
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	30 orang	56.60
4	DIV	3 orang	5.66
5	S1	12 orang	22.64
6	Profesi	5 orang	9.43
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		53 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Lubuk Tapi tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 30 orang atau 56.60% dan tidak ada yang berpendidikan DI, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.o
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Tungkal
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	7 orang	10.00
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	43 orang	61.43
4	DIV	14 orang	20.00
5	S1	12 orang	17.14
6	Profesi	5 orang	7.14
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		70 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Tungkal tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 43 orang atau 61.43% dan tidak ada yang berpendidikan DI, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.p
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Puskesmas Pagar Gading
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0 orang	0.00
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	22 orang	64.71
4	DIV	3 orang	8.82
5	S1	6 orang	17.65
6	Profesi	3 orang	8.82
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		34 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Puskesmas Pagar Gading tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori DIII sebanyak 22 orang atau 64.71% dan tidak ada yang berpendidikan SMA, DI, S2 dan S3.



Tabel 2.2.2.q
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di Rumah Sakit Hasanuddin Damrah
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	74 orang	11.75
2	DI	7 orang	1.11
3	DIII	6 orang	0.95
4	DIV	239 orang	37.94
5	S1	47 orang	7.46
6	Profesi	240 orang	38.01
7	S2	14 orang	2.22
8	S3	3 orang	0.48
Jumlah		630 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada Rumah Sakit Hasanuddin Damrah tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori Profesi sebanyak 240 orang atau 38.01% dan yang terendah adalah kategori berpendidikan S3 sebanyak 3 orang atau 0.48%.



Tabel 2.2.2.r
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di UPTD Instalasi Farmasi
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0 orang	0.00
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	6 orang	28.57
4	DIV	0 orang	0.00
5	S1	8 orang	38.09
6	Profesi	5 orang	23.81
7	S2	2 orang	9.52
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		21 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada UPTD Instalasi Farmasi tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori S1 sebanyak 8 orang atau 38.01% dan tidak ada yang berpendidikan SMA, D1, DIV, dan S3.



Tabel 2.2.2.s
Komposisi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
ASN di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	1 orang	14.29
2	DI	0 orang	0.00
3	DIII	2 orang	28.57
4	DIV	1 orang	14.29
5	S1	3 orang	42.86
6	Profesi	0 orang	0.00
7	S2	0 orang	0.00
8	S3	0 orang	0.00
Jumlah		7 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab,Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah tampak beragam mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai jenjang strata 3 (S3). Secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah kategori S1 sebanyak 3 orang atau 42.86% dan tidak ada yang berpendidikan D1, Profesi, S2 dan S3



b. Tempat Tugas

Tabel 2.2.2.b
Jumlah Tenaga Kesehatan Berdasarkan tempat tugas
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Kesehatan	85 orang	5.13
2	Labkesda	7 orang	0.42
3	Instalasi Farmasi	21 orang	1.27
4	Puskesmas	915 orang	55.19
5	RSUD	630 orang	37.99
Jumlah		1658 orang	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab,Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Berdasarkan tempat tugas dari total tenaga kesehatan di lingkungan dinas kesehatan yaitu sebanyak 1.658 orang, sebagian besar atau 55.19 % bertugas di Puskesmas dan ASN yang paling sedikit bertugas di Labkesda yaitu sebanyak 7 orang, sebagaimana tampak pada table 2.2.3 diatas.



c. Jenis Profesi

Tabel 2.2.2.c
Komposisi Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenis Profesi
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022

No	Jenis Sarana	Jumlah	Persentase (%)
1	Dokter	25	3.06
2	Dokter gigi	8	0.98
3	Perawat	209	25.55
4	Bidan	428	52.32
5	Promkes	50	6.11
6	Tenaga kesehatan	19	2.32
7	ATML	25	3.06
8	Tenaga gizi	24	2.93
9	Kefarmasian	30	3.67
Jumlah		818	100%

(Sumber: Seksi SDM Dinkes Kab, Bengkulu Selatan, Juni 2022)

Berdasarkan profesi sebagaimana tampak pada table 2.3 dibawah ini tenaga kesehatan terbanyak adalah bidan dan perawat. Tenaga bidan sebanyak 428 orang (52.32%), kemudian tenaga perawat sebanyak 209 orang (25.55%). Tenaga kesehatan yang terendah adalah dokter gigi sebanyak 8 Orang (0.98%).

2.3 Kinerja Pelayanan

Pembangunan dibidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

a. Kesehatan Ibu

Evaluasi Renstra Kementerian Kesehatan dan RPJMN serta RPJMD Tahun 2016 sampai dengan 2021 di mana Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berhasil menurunkan Angka kematian Ibu. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Pada kondisi awal tahun 2016 jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang dan



penyebabnya adalah gangguan sistem peredaran darah dan pada tahun 2021 ada 2 kematian ibu, penyebab kematian ibu ini adalah hipertensi dalam kehamilan.

b. Persentase Peserta KB Aktif

Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/6 minggu setelah melahirkan, sedangkan KB Pasca Keguguran merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran. Pada tahun 2021 jumlah peserta KB pasca persalinan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 1.303 orang.

c. Kesehatan Anak

Kematian Neonatal (AKN) adalah Kematian yang terjadi pada bayi usia sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri, sedangkan angka kematian neonatal adalah jumlah bayi yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (0-28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 KH pada tahun yang sama, Berdasarkan laporan Program Kesehatan kesehatan keluarga dan gizi jumlah bayi lahir hidup adalah sebesar 2.762 orang sedangkan AKN dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 adalah 7,6 per 1.000 kelahiran hidup.

1). Bayi

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Bengkulu Selatan masih mengalami naik turun. Pada tahun 2018 yaitu 9,7 per 1.000 KH, tahun 2019 turun yaitu 6.3 per 1000 KH, pada tahun 2020 kembali turun menjadi 6.1 per 1000 KH dan pada tahun 2021 menjadi 4.0 per 1.000 kelahiran hidup . Jika dibedakan menurut jenis kelamin, angka kematian bayi laki-laki lebih besar dibanding dan bayi perempuan. Pada tahun 2021 Angka Kematian Bayi laki-laki 9,5 per 1.000 KH sedangkan bayi perempuan 8,6 per 1.000 KH (Seksi KIA-Gizi, 2021).

2). Balita

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0-59 bulan (bayi+anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Secara Keseluruhan jumlah kematian balita di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 sebanyak 1 balita mati dari 11.278 jumlah Balita yang ada. Angka Kematian Balita di



Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 adalah 0,4 per 1.000 KH mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 adalah 0.4 per 1.000 KH.

1. Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena *intrauterine growth retardation* (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.762 bayi baru lahir, dengan BBLR sebanyak 52 (8,4%). Untuk penanganan bayi dengan BBLR meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi dan penanganan masalah pada BBLR yang diberikan di sarana pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah oleh tenaga yang berkompetensi.

2. Persentase Bayi diberi ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini dan sebanyak mungkin sejak bayi dilahirkan hingga bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain, bahkan air putih sekalipun. Dengan kata lain, ASI eksklusif berarti hanya ASI sebagai makanan satu-satunya, tanpa tambahan apapun. Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi usia 0-6 bulan sebanyak 1.579 (81.1%).

3. Persentase Balita Gizi Kurang (BB/Umur), dan Kurus (BB/TB)

- 1) Status gizi balita berdasarkan indeks BB/U mempunyai kategori: gizi buruk, kurang, baik dan lebih. Hasil entry data e-PPGBM yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 dengan sasaran balita berjumlah 10.018 balita menunjukkan presentase balita status gizi buruk sebesar 5%, dan yang mempunyai status gizi kurang sebesar 1.2% sehingga persentase *Underweight* (gizi buruk + gizi kurang) sebesar 6.2%.



- 2) Menyajikan status gizi balita (0-59 bulan) berdasarkan indeks TB/U. Hasil entry data e-PPGBM yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021. Sasaran balita berjumlah 10.018 dengan persentase balita pendek sebesar 1.9 %, dan persentase balita kurus 0.7%.

4. Pengendalian Penyakit Yang Dapat di Cegah dengan Imunisasi

- 1) *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) Non Polio per 100.000 Penduduk <15 tahun. *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) non polio adalah kelumpuhan pada anak berusia < 15 tahun yang bersifat layuh (*flaccid*) terjadi secara akut mendadak dan bukan disebabkan ruda paksa. Jumlah kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) non polio di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 secara absolute berjumlah 2 kasus.

- 2) Jumlah dan CFR difteri

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae*. Penyebarannya adalah melalui kontak fisik dan pernafasan. Gejala awal penyakit adalah radang tenggorokan, hilang nafsu makan dan demam ringan. Dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru biruan pada tenggorokan dan tonsil. Difteri dapat menimbulkan komplikasi berupa gangguan pernafasan yang berakibat kematian. Sepanjang tahun 2021 tidak ditemukan kasus difteri.

- 3) Jumlah Pertusis dan Hepatitis B

Disebut juga batuk rejan atau batuk 100 hari adalah penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis*. Penyebaran pertusis adalah melalui percikan ludah (*droplet infection*) yang keluar dari batuk atau bersin. Gejala penyakit adalah pilek, mata merah, bersin, demam, dan batuk ringan yang lama-kelamaan batuk menjadi parah dan menimbulkan batuk menggigil yang cepat dan keras. Komplikasi pertusis adalah pneumoniae bacterialis yang dapat menyebabkan kematian. Sepanjang tahun 2021 tidak ditemukan kasus Pertusis dan Hepatitis B

- 4) Jumlah dan CFR Tetanus Neonatorum.

Adalah penyakit yang disebabkan oleh *Clostridium tetani* yang menghasilkan neurotoksin. Penyakit ini tidak menyebar dari orang ke orang, tetapi melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Gejala awal penyakit adalah kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan demam. Pada bayi terdapat juga gejala berhenti menetek (*sucking*) antara 3 sampai dengan 28 hari setelah lahir. Gejala berikutnya adalah kejang yang hebat dan tubuh



menjadi kaku. Komplikasi tetanus adalah patah tulang akibat kejang, pneumonia dan infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian. Sama halnya dengan difteri dan pertusis. Sepanjang tahun 2021 *Tetanus Neonatorum* tidak ditemui di Kabupaten Bengkulu Selatan. (Seksi Surveilans dan imunisasi, 2021).

5) Jumlah Suspek Campak

Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus myxovirus viridaemeasles. Disebarkan melalui udara (percikan ludah) sewaktu bersin atau batuk dari penderita. Gejala awal penyakit adalah demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, conjunctivitis (mata merah). Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. Komplikasi campak adalah diare hebat, peradangan pada telinga dan infeksi saluran napas (pneumonia). Pada tahun 2021 jumlah suspek campak di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 4 orang, dengan rincian 10 laki-laki dan 5 perempuan. (Seksi Surveilans dan imunisasi, 2021).

5. Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: - Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. - Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular Di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 jumlah usia produktif sebesar 110.063 dan yang mendapat pelayanan 76.362 orang. (Seksi P2PTM dan Keswa, 2021).

6. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1) Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar bersama dengan malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen bersama. Pada tahun 2021 di Bengkulu Selatan tercatat sebanyak 126 kasus terduga tuberkulosis dan 100% mendapatkan pelayanan sesuai standar (Seksi P2PM, 2021).

2) Angka Kesembuhan(*Cure Rate*)Tuberkulosis Paru Terkomfirmasi Bakteriologis.

Dalam mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan indikator persentase sembuh, persentase pengobatan lengkap dan angka keberhasilan pengobatan *Cure Rate* (CR). Dari



hasil pemeriksaan sepanjang tahun 2021 diketahui ada sebanyak 158 penderita TB Paru yang terdaftar dan diobati dengan kesembuhan sebanyak 52 penderita atau 80 % (Seksi P2PM, 2021).

7. Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada Balita

Diare adalah penyakit yang terjadi ketika terjadi perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita Diare bila feses lebih berair dari biasanya, atau buang air besar tiga kali atau lebih atau buang air besarnya yang berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Sepanjang tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan jumlah target penemuan sebanyak 192 kasus diare balita dan yang dilayani sebanyak 0 orang (Seksi P2PM, 2021).

8. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1) Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.

Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah (arteri). Angka 140 mmHG merujuk pada bacaan sistolik, ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: - Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; - Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat. Sepanjang Tahun 2021 jumlah estimasi >15 tahun penderita hipertensi di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 28.568 orang dan yang mendapatkan pelayann kesehatan 6.164 orang (21,6%) (Seksi PTM dan Keswa, 2021).

2) Persentase Penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Diabetes Melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel *beta langerhans* kelenjar pankreas, atau disebabkan



oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 1999). di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 jumlah penderita Diabetes Melitus sebanyak 11.242 orang dan 1.728 (15.4%) yang mendapat pelayanan sesuai standar.

3) Persentase Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

Kanker serviks adalah kanker yang terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal, dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Fungsinya yaitu menghubungkan vagina dengan rahim. Kanker ini adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi pada wanita di seluruh dunia. dan hingga saat ini belum jelas secara pasti apa penyebab kanker payudara. Namun jika Anda memiliki keluarga inti (misalnya, ibu, kakak, adik atau anak) yang mengidap kanker payudara atau ovarium, risiko Anda untuk terkena kanker payudara akan meningkat. Di Kabupaten Bengkulu Selatan jumlah wanita usia wanita 30 – 50 sebanyak 27.324 orang yang mendapatkan pemeriksaan leher rahim payudara sebanyak 64 (0.2 %).

4) Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan ODGJ sering terabaikan, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial masih terdapat stigma dimasyarakat sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa.

Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan kesehatan. Sedangkan secara hukum, peraturan perundang-undangan yang ada belum komprehensif sehingga menghambat pemenuhan hak ODMK dan ODGJ. Tujuan dari Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Masalah Jiwa ini adalah Masyarakat Provinsi Bengkulu dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa. Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat sebanyak 245 sasaran orang dengan gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan sebanyak orang 239 (97,6 %). (Seksi PTM dan Keswa, 2021).

9. Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat

Kualitas air minum yang memenuhi syarat adalah kualitas air minum yang memenuhi syarat secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan Penyelenggara air minum adalah Badan usaha



milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum, tidak termasuk air kemasan, depot air minum isi ulang, penjual air keliling, dan pengelola tangki air. Tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan pemeriksaan air bersih sebanyak 10 sampel dari sebanyak 63 jumlah sarana air minum yang ada. (Seksi Kesling Kesjaor, 2021).

10. Persentase Penduduk Akses Terhadap Jamban Sehat

Sanitasi Layak adalah fasilitas pembuangan tinja (jamban) yang digunakan sendiri atau bersama, yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, dilengkapi dengan tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dengan kloset leher angsa atau tidak leher angsa yang tertutup dan pembuangan akhir tidak mencemari sumber air/tanah. Dari data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dari 73.141 jumlah KK di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021, keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) yang digunakan adalah 52.668 (72.0%).

11. Persentase Desa STBM

Pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Desa yang sudah melakukan pemicuan minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja masyarakat/Natural Leader, dan telah mempunyai rencana tindak lanjut untuk menuju Sanitasi Total. Desa yang telah mencapai 100% penduduk melaksanakan 5 pilar maka desa tersebut dapat dikategorikan Desa STBM. Desa yang penduduknya 100% mengakses jamban sehat maka desa tersebut dapat dikatakan Desa Stop BABS (SBS). Tahun 2021 dari 158 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah melaksanakan STBM sebanyak 135 desa (85.4%), dan yang Stop BABS sebanyak 63 desa (39,9%).



Tabel T-C 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026

No	Indikator kinerja sesuai TUSI SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD pada tahun-						Realisasi Capaian Pada Tahun-						Rasio Capaian pada tahun-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																					
	Sasaran 1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Balita dan Anak			Angka Kematian Ibu (AKI)	0	0	0	0	0	0												
				Angka Kematian Bayi (AKB)	10	10	9	9	8	7												
	Sasaran 2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat			Prevalensi Gizi Buruk	100	100	100	100	100	100												
				Prevalensi Stunting																		
	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dari Penyakit			Persentase Cakupan Imunisasi																		
				Persentase Penyakit Menular yang ditangani																		

[illegible]



2.4 Anggaran dan Realisasi

TABEL T-C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	BELANJA	170.801.360.661	94.381.381.662	271.778.169.477			150.410.504.128	86.974.311.190	244.130.613.556			88	92	90				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	51.681.828.500	58.095.194.700	61.894.232.100	64.403.277.400		51.696.491.812	58.045.667.536	61.224.148.086	63.596.570.777		100	100	99	94			
	BELANJA LANGSUNG	119.119.532.161	36.286.186.962	209.883.937.377	105.080.444.222		98.714.012.316	28.928.643.654	182.906.465.470	99.133.400.766		83	80	87	100			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.140.155.500	1.199.340.148	1.508.185.100	1.326.207.500		1.122.201.948	1.097.496.672	1.461.477.839	1.323.413.618		98	92	97	100			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.375.943.400	811.081.375	187.381.900	635.954.300		3.138.206.219	611.959.800	175.887.791	632.856.300		93	75	94	100			



3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	128.600.000	134.417.000	100.000.000			126.800.000	38.444.500	100.000.000			99	29	100	100			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	189.886.000	147.615.850	136.778.420	148.399.000		189.605.400	144.776.850	136.778.420	148.211.500		100	98	100	97			
5	program obat dan perbekal	2.542.994.000	2.457.354.000	1.299.669.000	1.869.202.189		1.441.458.500	1.802.449.152	1.217.514.630	1.821.075.672		57	73	94	94			
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.571.992.200	16.009.302.339	23.242.528.436	54.053.652.726		11.760.856.037	11.927.016.077	16.858.208.474	50.895.874.070		71	75	73	99			
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	110.825.000	125.685.000	180.000.000	150.991.000		109.683.800	49.285.000	170.100.000	148.823.000		99	39	95	99			
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	366.217.000	303.905.450	1.079.069.500	712.824.990		360.219.994	213.406.800	1.043.836.898	704.054.990		98	70	97	98			
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	266.035.000	312.422.000	480.000.000	1.612.278.600		258.655.000	182.524.000	195.897.000	1.577.394.600		97	58	41	100			
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	319.396.000	396.706.000	200.003.000	236.528.000		278.838.000	318.078.500	195.584.000	236.528.000		87	80	98	100			



11	perencanaan pembangunan daerah	41.271.250	20.000.000				41.266.000	19.932.000				100	100	#DIV/0!	93			
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	582.630.000	375.989.500	419.200.000	450.000.000		481.267.000	250.000.900	227.566.000	418.619.000		83	66	54	88			
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.101.714.500	1.662.733.000	1.042.294.000	1.209.687.000		1.075.749.808	1.536.199.000	1.041.152.500	1.058.745.000		98	92	100	94			
14	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		10.300.000.000	51.630.656.000	41.211.458.950			9.276.448.103	46.779.035.702	38.781.247.101		#DIV/0!	90	91	99			
15	program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	95.243.000	182.196.400	95.000.000	370.327.500		91.826.000	169.414.000	89.787.500	367.785.900		96	93	95	100			
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		31.801.100	50.000.000	85.400.000			30.228.000	47.721.000	85.220.000		#DIV/0!	95	95	100			



17	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	53.263.000	71.715.300	60.000.000	79.197.000		53.261.000	70.535.300	59.157.200	79.197.000		100	98	99	100			
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	295.025.400	275.922.500	25.000.000			289.022.400	199.394.000	23.362.500			98	72	93	98			
19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		700.000.000	410.000.000	295.553.967			346.268.000	313.392.811	290.785.515		#DI V/0!	49	76	76			
20	Program Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		95.000.000	115.000.000	95.010.000			95.000.000	112.845.936	71.937.000		#DI V/0!	100	98	91			
21	Program Surveilans dan Imunisasi		670.000.000	459.996.500	537.771.500			549.787.000	64.576.500	491.632.500		#DI V/0!	82	14	91			
		27.181.191.250	36.283.186.962	82.720.761.856	105.080.444.222	105.080.442.222	20.818.917.106	28.928.643.654	70.313.882.701	99.133.400.766	105.080.442.222	77	80	85	94	100	100	100

Pada Tahun 2021 Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp 105,849,980,817 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp.35,872,984,187 dan Belanja Tidak Langsung Rp 69.976.996.630 dan Realisasinya sebesar 98,576,836,338 dengan rincian Belanja Langsung Rp.28,741,620,198 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 69,835,216,140



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan

1. Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tatanan kehidupan dan pola pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. Masyarakat masih belum dapat menjalan kebiasaan baru pada masa pandemi, sehingga mempengaruhi angka kesakitan COVID-19;
3. Melemah kemampuan masyarakat membayar iuran JKN-KIS dampak perekonomian selama pandemi COVID-19;
4. Adanya perbedaan kepentingan (*vested interested*) dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan karena janji kampanye yang berbeda dalam pembangunan kesehatan;
5. Melemah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
6. Pembiayaan pembangunan kesehatan bersumber dana APBN dan APBD masih terbatas, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;

b. Peluang

1. Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026, merupakan acuan untuk bidang kesehatan dalam perencanaan sampai dengan tahun 2024.
2. Pemerataan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas di pedesaan dan daerah terpencil telah tersedia;
3. Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026
4. Tersedia dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik dan non fisik bidang kesehatan;
5. Dana desa dan kelurahan dapat dialokasikan untuk pembangunan bidang kesehatan
6. Dana zakat dari Badan Amil Zakat/Lembaga amil zakat dapat dipergunakan untuk pembiayaan JKN-KIS bagi masyarakat yang tidak mampu.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Upaya Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan namun angka tersebut masih jauh dari target SDG's tahun 2015 (102/100.000 KH), Diperlukan upaya yang luar biasa untuk pencapaian target. Demikian halnya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), masih jauh dari target SDG's (23/1.000 KH) kalau dilihat dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih on track walaupun diperlukan sumber daya manusia yang kompeten.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan lanjut sudah meningkat, ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit, dibentuknya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tiap desa, dan dijaminnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui pemberian bantuan iuran (PBI) dan Kartu Bengkulu Sehat (KBS), sehingga masyarakat miskin mendapat jaminan pembiayaan untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar dan lanjut di rumah sakit. Akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pelayanan di rumah sakit belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan karena jarak tempuh dan geogrfis wilayah, terutama di daerah tertinggal terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Terjadi penurunan angka kesakitan, tetapi penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target SDG's. Peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu program inovasi untuk peningkatan upaya promotif dan preventif untuk mencegah penularan.



1. Gizi Masyarakat

Gizi lebih dan gizi kurang masih menjadi permasalahan di Provinsi Bengkulu. Kelompok gizi lebih adalah *overweight* (obesitas) dan eksek mikronutrien (misalnya kelebihan natrium). Kelompok gizi kurang antara lain *underweight*, *wasting*, *stunting* dan defisiensi mikronutrien. Penurunan prevalensi *wasting* dan *stunting* pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Target *stunting* pada tahun 2024 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024 sebesar 14%. Target ini memerlukan upaya yang konsisten dan menyeluruh seluruh lintas sektor yang terkait untuk fokus menurunkan prevalensi *stunting*.

2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular sedangkan penyakit menular belum tuntas. Hal ini merupakan fenomena yang dialami sebagian besar negara berkembang, karena terjadi perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan. Faktor risiko perilaku yang menyebabkan penyakit tidak menular meningkat seperti hipertensi dan diabetes melitus (DM), memerlukan upaya promotif dan preventif yang optimal. Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) akan diutamakan dalam upaya menekan laju peningkatan penderita penyakit tidak menular.

3. Penyakit Menular

a) TBC

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. Pada tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebanyak 126 kasus terduga tuberkulosis. Dari hasil pemeriksaan diketahui ada sebanyak 65 kasus tuberkulosis paru yang terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati, 51% kasus tuberkulosis terdaftar dan diobati, angka kesembuhan sebanyak 52 (80.0%) penderita. Masih adanya penderita TB yang



belum sembuh dan diobati akan dapat menularkan kepada masyarakat di sekitar penderita. Upaya menurunkan jumlah kasus dan jumlah penderita serta meningkatkan angka kesembuhan akan dilakukan selama pembangunan 2016-2021 ini.

b) Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi

Jumlah kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) non polio di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 secara absolut mengalami kenaikan yaitu 2 kasus dengan AFP Rate 4,0 per 100.000 penduduk sedangkan pada tahun 2020 ditemui 1 kasus dengan AFP Rate 1,3 per 100.000 penduduk usia <15 tahun. Masih ada kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) perlu dilakukan upaya pencegahan dengan mengoptimalkan SOP Imunisasi dan pelacakan gejala didaerah terjadi AFP.

4. Penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat

Terjadi pandemi COVID-19 tahun 2020 menjadi bertambah jenis penyakit menular yang mudah menular dan dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan infeksi akan tingkatkan penerapakan memakai maskes, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) dan *testing tracking, treatment* (3T).

Kegawatdaruratan kesehatan masyarakat memerlukan upaya khusus untuk penanggulangan. Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan komitmen kerjasama lintas program dan sektor terkait. Tersedia dokumen rencana kontijensi sebagai pedoman dalam melakukan aksi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara. Tersedianya instrumen kesiapsiagaan, deteksi dini dan respon cepat dalam hal menghadapi kemungkinan terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat Di pintu masuk Negara.Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah melaksanakan rencana kontijensi telah dilatih dan bekerjasama dengan lintas sektor dan lintas program, ditahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan merencanakan melaksanakan pertemuan dan pelatihan rencana kontijensi di Kabupaten Bengkulu Selatan.



5. Surveilans Penyakit Berbasis Laboratorium.

Surveilans berbasis laboratorium adalah kegiatan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular (PTM) dan FR dengan berbasis data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di Laboratorium. Penyelenggaraan dilakukan oleh Petugas Laboratorium di laboratorium pemerintah maupun swasta.

Surveilans berbasis laboratorium digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti *salmonellosis*, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi *outbreak* penyakit dengan lebih segera dan lengkap, daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindroma dari klinik-klinik.

Surveilans berbasis laboratorium merupakan bagian dari sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) yang laporan satu kesatuan dengan aplikasi SKDR yang merupakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman KLB penyakit menular. SKDR ini yang sebagai alat monitoring kejadian penyakit menular sehingga respon program dapat cepat, tepat dan akurat.

6. Imunisasi

Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Imunisasi telah menjadi program pencegahan penyakit di seluruh dunia. Semua negara anggota Badan Kesehatan Dunia (WHO) memiliki program imunisasi masing-masing untuk mengurangi risiko penularan penyakit tertentu dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Di Indonesia Kementerian Kesehatan menerapkan imunisasi bagi anak sejak usia 0 hingga 18 tahun.

Di Indonesia imunisasi terdiri dari imunisasi rutin yang terdiri dari Hepatitis, BCG, Polio, DPT-HB-Hib, IPV dan Campak di laksanakan pada anak umur 0-9 bulan, imunisasi tambahan digunakan untuk melengkapi imunisasi dasar pada anak serta imunisasi khusus merupakan imunisasi pada penyakit tertentu seperti meningitis



pada calon Jemaah haji dan COVID-19. Target dan cakupan pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Bengkulu Selatan setiap tahunnya mencapai target yang telah disepakati, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun.

.7. Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Faktor risiko kesehatan lingkungan, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial berpengaruh besar terhadap status kesehatan. Pemaparan terhadap logam berat dan pestisida selama kehamilan diketahui dapat meningkatkan risiko hipertensi dalam kehamilan. Paparan pestisida juga berisiko terjadinya gangguan pertumbuhan balita, gangguan pertumbuhan di dalam kandungan dan juga setelah lahir bisa menyebabkan balita *stunting*.

Faktor risiko kesehatan lingkungan, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial berpengaruh besar terhadap status kesehatan. Pemaparan terhadap logam berat dan pestisida selama kehamilan diketahui dapat meningkatkan risiko hipertensi dalam kehamilan. Paparan pestisida juga berisiko terjadinya gangguan pertumbuhan balita, gangguan pertumbuhan di dalam kandungan dan juga setelah lahir bisa menyebabkan balita *stunting*. Risiko lingkungan merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial ekonomi budaya. Salah satu bahaya yang berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan yakni bahaya kimia yang berupa keberadaan polutan di udara.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan upaya untuk mendukung pencapaian universal akses sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia. Program pemicuan STBM mencakup lima pilar yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah



tangga. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM terus meningkat setiap bulannya, Selama tahun 2021 jumlah desa yang melaksanakan STBM sebanyak 135 desa, dimana ada 7 Kecamatan yang telah 100 % desanya telah melaksanakan STBM di Kabupaten Bengkulu Selatan.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Masyarakat sudah mulai sebagai subyek dalam pembangunan kesehatan dengan melakukan perubahan perilaku masyarakat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pemanfaatan dan penungkatan kualitas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes, Posbindu PTM. Upaya kesehatan juga sudah mulai mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, dan dapat menyebabkan menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 8 Tahun 2019 adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Masyarakat diperlakukan sebagai subjek atau pelaku dalam pembangunan kesehatan bukan sebagai objek seperti yang selama ini telah kita lakukan.

Selanjutnya dalam proses pemberdayaan ada upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya. UKBM tersebut antara lain: Posyandu, Poskesdes, Posbindu PTM, Poskestren, Pos Lansia, Pos UKK, PKPR, TOGA, POD dan upaya kesehatan masyarakat lainnya.



Selain itu upaya perubahan perilaku atau gaya hidup dari yang belum atau kurang sehat kearah perilaku hidup sehat yang dikenal dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sebagai upaya dan langkah strategis dalam upaya penurunan penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Upaya penerapan PHBS inilah yang dikenal dengan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

Dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan juga dikenal dengan upaya lain yaitu: advokasi dan kemitraan. Advokasi merupakan upaya mempengaruhi penentu kebijakan untuk mengambil langkah dan kebijakan yang mendukung program kesehatan yang strategis, urgen, mendesak dan penting, sedangkan kemitraan merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan, dengan prinsip dasar, kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

9. Pelayanan Kesehatan

a. Layanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan (yankes) Primer merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar bersifat preventif, berkesinambungan dan dapat diakses masyarakat luas. Oleh karena sifatnya sangat penting, maka penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi wajib. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup. Semuanya berhubungan erat dengan kualitas pelayanan primer.

Beberapa hal yang masih harus diperkuat dalam pelayanan kesehatan primer adalah ketersediaan sumber daya kesehatan berupa Sarana dan prasarana termasuk ketersediaan alat kesehatan , obat-obatan, sistem rujukan kasus serta ketersediaan Sumber Daya Manusia. Program penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan kementerian Kesehatan telah melaksanakan Program Nusantara Sehat, yang tujuannya meningkatkan pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan jumlah



sebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan berbasis tim. Adapun fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang termasuk dalam layanan kesehatan primer adalah Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Praktek Gigi.

b. Layanan Kesehatan Sekunder dan Tersier

Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadangkala pelayanan subspesialis, tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care) adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan).

Di Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 2 Rumah Sakit yaitu 1 rumah sakit umum daerah dan 1 rumah sakit swasta.

10. Sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Obat merupakan salah satu komponen yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan dan digunakan pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan pemulihan penyakit. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak azasi manusia sehingga penyediaan obat esensial tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan publik maupun swasta.

Penyediaan dan pengelolaan anggaran untuk obat dan alat kesehatan (alkes) di sektor publik dilaksanakan secara konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil peran memastikan bahwa pasokan obat program kesehatan dan stok penyangga (*buffer stock*) memadai, serta memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya.

Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sudah > 80%. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah obat dan vaksin esensial sudah 100%. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah disparitas ketersediaan obat dan



alkes antar daerah, terutama di DTPK, serta ketersediaan antar tingkat pelayanan kesehatan

11. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang dibayar oleh Pemerintah. Cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) adalah meliputi kecukupan sisi supply dan cakupan kepesertaan JKN.

Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya kesehatan perorangan, namun tidak tepat untuk membiayai berbagaimacam intervensi kesehatan masyarakat. Intervensi kesehatan masyarakat atau UKM adalah publik goods sehingga pembiayaan yang tidak melalui mekanisme asuransi kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik melalui APBN dan atau APBD. Perlu ada jaminan pembiayaan kesehatan di APBN dan APBD serta ada keseimbangan pembiayaan yang memadai untuk UKP dan UKM.

Pemerintah terus mengupayakan seluruh masyarakat mendapatkan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait pelayanan kesehatan yang berkualitas dan



bermutu, mulai dari desa hingga perkotaan di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2021, cakupan kepesertaan untuk penggunaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) masih di bawah standar nasional yaitu 65,6 persen. Perlu upaya dan langkah strategis untuk mencapai target yang ditetapkan, maksimal tahun 2024 mencapai 98 persen. Salah satu langkah untuk percepatan pencapaian target UHC, saat ini sesuai dengan Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan seluruh kepala desa dan perangkatnya dapat masuk dalam kepesertaan BPJS kesehatan. Jenis Kepesertaan Cakupan Jaminan Kesehatan Tahun 2021 yakni: Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari: PBI APBN 54.498 orang dan PBI APBD 14.587 orang dan Non PBI yang terdiri dari : Pekerja Penerima Upah (PPU) 23.543 orang, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri 16.843 orang, Bukan Pekerja 2.344 orang.

Permasalahan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pandemi COVID-19 membawa perubahan tatanan pelayanan kesehatan, sehingga perlu upaya promotif dan preventif khusus dan memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama;
- b. Masih kurang SDM kesehatan di Puskesmas untuk DTPK dan kurang diminati;
- c. Jarak Desa DTPK yang berjauhan, sehingga diperlukan sumber daya yang besar untuk memenuhi pelayanan kesehatan di DTPK;
- d. Masih rendah sinkronisasi pelaksanaan program kesehatan antara pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Masih rendah sinkronisasi pembangunan kesehatan antar sektor yang terkait.
- f. Masih tinggi pembiayaan upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif, sehingga upaya promotif dan preventif terbatas sumber daya.
- g. Masih kurangnya tenaga teknis dalam bidang kesehatan seperti epidemiologi, vaksinator, dokter spesialis tertentu, promosi kesehatan.



3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2024 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 tersebut adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI MENUJU
BENGKULU SELATAN EMAS (ELOK, MAJU, AMAN, DAN
SEJAHTERA) BERLANDASKAN CINTA-BS”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

1. Mewujudkan sumber daya yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Berkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu selatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pembangunan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Bengkulu selatan selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi ke satu Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu “Mewujudkan sumber daya yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing”.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan pedoman RPJMD maka Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-



program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain :

Penghambat :

1. Kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah.
2. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
3. Belum merata jumlah kualifikasi tenaga pelayanan kesehatan.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.
5. Masih rendahnya persentase pembiayaan kesehatan dari APBD.

Pendorong :

1. Tersedianya sebagian SDM yang memadai dari sisi kuantitas.
2. Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata di setiap kecamatan.
3. Meningkatnya sumber dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Penyusunan rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan sinkronisasi rencana strategi Kementerian Kesehatan. Sinkronisasi dilakukan dengan menelaah program dan kegiatan yang mempunyai kesamaan untuk dilakukan pemetaan pembiayaan, kegiatan dan penerapan lokasi. Sasaran pembangunan kesehatan pada renstra sama dengan sasaran pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting.

3.4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dilakukan dengan sinkronisasi rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Sasaran pembangunan kesehatan pada renstra sama dengan sasaran pembangunan kesehatan Dinas



Kesehatan Provinsi Bengkulu antara lain untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kesakitan.

3.4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan

Telaah terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun faktor-faktor yang menjadi pendukung/pendorong dalam memberikan pelayanan bagi SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah (RPJMD) khususnya bidang Dinas Kesehatan.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

Perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang sangat terkait dengan tata ruang wilayah antara lain penyediaan sarana air bersih dan jamban sehat, pengelolaan limbah medis yang dihasilkan unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit dan laboratorium kesehatan. Peningkatan akses pelayanan dengan membangun Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium sangat terkait dengan pengembangan rencana tata ruang dan kebijakan lingkungan. Pembangunan sarana pelayanan dapat memberi dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak ditata dan memenuhi standar bangunan dan tata letak

Pengaturan tata ruang untuk penerapan kawasan bebas asap rokok belum disesuaikan, sehingga tata ruang perlu disesuaikan untuk dapat diterapkan pada pembangunan yang baru atau yang baru direhap.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dalam pembangunan kesehatan kesehatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pandemi COVID-19 mengubah tatanan pelayanan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat;
- b. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi/terstandar;



- c. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar;
- d. Bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas perlu ditingkatkan dan dikelola secara efektif, sehingga mempercepat pencapaian SDG's.
- e. Kebutuhan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular (PTM), lansia, bayi, ibu hamil;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Casecding

Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah menetapkan Visi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yaitu: Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas (Elok, Maju, Aman, dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta-BS. Melaksanakan Visi Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan menjabarkan Visi Bupati di bidang kesehatan yaitu: Terwujudnya Bengkulu Selatan sehat dan Sejahtera.

Sebelum dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 hanya menetapkan 3 indikator yaitu: (1) Angka Kematian Bayi, (2) Angka Kematian Ibu dan (3) Angka Kesakitan, setelah dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dan guna meningkatkan kualitas manusia, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan visinya: “Terwujudnya Bengkulu Selatan Sehat dan Sejahtera, menetapkan 5 indikator, yaitu: (1) Angka Kematian Bayi, (2) Angka Kematian Ibu, (3) persentase Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular, (4) Persentase Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, (5) Persentase Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap lingkungan dan pola perilaku hidup bersih dan sehat

Dalam upaya mencapai Visi Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 yakni: Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas (Elok, Maju, Aman, dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta-BS, maka ditetapkan misi Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 dalam bidang kesehatan yaitu misi pertama: Mewujudkan Sumber daya manusia berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

Rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan indikator dari



RPJMD dalam bidang kesehatan ini yaitu umur harapan hidup. Sasaran pembangunan kesehatan adalah: (1) Angka Kematian Bayi, (2) Angka Kematian Ibu, (3) persentase Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular, (4) Persentase Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, (5) Persentase Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap lingkungan dan pola perilaku hidup bersih dan sehat.



TABEL T-C 2.5
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	/1000 kelahiran hidup	/1000 KH	18,6	17,6	16	15	14	seksi Kia-Gizi	Bidang Kesmas
				2. Angka kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	/ 100.000/kelahiran hidup	/100.000 KH	205	194	183	172	161	seksi Kia-Gizi	Bidang Kesmas
				3. persentase meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan penyakit tidak menular	1. jumlah desa UCI/jumlah desa	%	93	93	93	93	93	seksi Surveilans dan Imuniasi	Bidang P2P
					2. jumlah kasus penyakit menular yang ada/jumlah kasus penyakit menular yang ditangani	%	100	100	100	100	100	Seksi P2PM	Bidang P2P
					3. jumlah desa dengan posbindu PTM/jumlah desa	%	100	100	100	100	100	Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa	Bidang P2P



				4.persentase meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. jumlah penduduk dengan jaminan kesehatan/jumlah penduduk	Orang	168.326	170.009	171.709	173.426	175.160	Seksi Yankes	Bidang Yankes
					2. jumlah fasyankes terstandar/jumlah fasyankes	Unit	16	16	16	16	16	Seksi Yankes	Bidang Yankes
				5. persentase meningkatnya masyarakat terhadap lingkungan dan pola PHBS	1.persentase desa Stop BABS	%	62	65	70	75	80	Seksi Kesling Kesjaor	Bidang Kesmas
					2.pesentase desa yang melaksanakan PHBS dan germas	%	80	85	90	95	100	Seksi Promkes	Bidang Kesmas



BAB V

STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan Perubahan Rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah



Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Logic Model*.



Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas berlandaskan Cinta BS

MISI : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sejahtera dan Berdaya Saing

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	-Meningkatkan pemberdayaan swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan dengan mendorong kerjasama antar masyarakat, antar golongan serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. - Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan cara pengutamaan pada upaya promotif-preventif. Dengan pemenuhan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar. -Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu. - Meningkatnya Penyuluhan kesehatan yang diarahkan untuk membudayakan	-Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan, yang dilakukan melalui peningkatan program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. -Memperbanyak dan Pemerataan Penempatan Dokter Umum dan Spesialis serta Tanaga Medis, yang dilakukan melalui Peningkatan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. -Pengembangan Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin, yang dilakukan melalui peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. -Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi Standar dan terjangkau oleh masyarakat, yang dilakukan melalui : peningkatan program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Program Pengembangan



--	--

perilaku hidup sehat dan lingkungan hidup yang bersih.

Obat Asli Indonesia, Peningkatan Program Pengawasan Obat dan Makanan, Peningkatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

-Perbaikan Gizi Masyarakat, yang dilakukan melalui : Peningkatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Peningkatan Program Upaya Kesehatan, Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Lansia.

-Pengembangan Pola Hidup Bersih dan Sehat, yang dilakukan melalui : Peningkatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Peningkatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,

-Memperbanyak dan pemeratakan fasilitas kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil, yang dilakukan melalui peningkatan program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

-Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, yang dilakukan melalui Peningkatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



		-kesehatan ibu, bayi dan balita, yang dilakukan melalui Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. -standarisasi, Promosi dan kemitraan pelayanan kesehatan, yang dilakukan melalui Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
--	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, Dinas kesehatan menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesehatan, Ada beberapa program yang sangat berperan penting untuk tercapainya tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, indikator kinerjanya adalah Angka Harapan Hidup. Ada beberapa indikator sasaran yang diperkuat oleh tujuan, indikator tujuan serta sasaran dinas kesehatan kabupaten Bengkulu Selatan tersebut: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), persentase meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, persentase meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, persentase meningkatnya masyarakat lingkungan dan pola PHBS.

Pada Program penunjang urusan pemerintah pusat, indikatornya adalah: nilai AKIP OPD, % tata kelola keuangan sesuai SAP, % tata kelola keuangan sesuai SAP

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, indikator nya adalah persentase cakupan kunjungan antenatal dan penerapan standar 10T, persentase cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, angka kematian ibu dan bayi rendah, Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (sd 14%/Desa), Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Bumil KEK dan Anemia (sd 10%), Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan, Persentase Desa yang Melakukan Pembinaan Posyandu Aktif (51%-90%), Cakupan Pengukuran Kebugaran Bagi Pekerja (15-35%), Persentase Desa Stop BABS dan Cakupan Penghunukan air Minum (62%-80%), Persentase Desa/Kel Sehat, tercapainya IDL 95% dan UCI di wilayah puskesmas (95%), Presentase Angka Kesakitan Menurun Presentase Kepuasan Masyarakat Meningkat, jumlah fasilitas kesehatan dan SDM yang terstandarisasi, Presentasi mutu pelayanan kefarmasian meningkat.



Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, indikatornya adalah Meningkatnya TPM dan DAM dalam Mewujudkan TPM dan DAM yang memenuhi Standar Kesehatan, Presentasi mutu pelayanan kefarmasian meningkat.

program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, indikatornya jumlah fasilitas kesehatan dan SDM yang terstandarisasi.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan indikatornya Jumlah Lembaga yang Berpartisi dalam Promkes, Persentase Desa yang Menegakkan germas.

. Untuk rincian dari Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel T-C 27 sebagai berikut.



Tabel T-C 2.7
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						75.559.243.311		106.923.454.000		107.992.689.000		109.072.615.000		110.163.342.000		434.152.100.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						690.793.739		1.872.873.213		2.102.880.883		1.720.539.895		795.059.113		6.491.353.104
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	85.734.814	2 Dokumen	294.308.295	2 Dokumen	303.739.125	2 Dokumen	364.113.037	2 Dokumen	125.524.341	8 Dokumen	1.087.684.798
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	1.200.000.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	321.220.459	2 dokumen	220.000.000	2 Dokumen	110.000.000	8 Dokumen	861.220.459
Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	110.000.000	8 Dokumen	750.000.000
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	260.000.000	2 Dokumen	360.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	110.000.000	8 Dokumen	950.000.000



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Laporan		2 Laporan	85.058.925	2 Laporan	243.564.918	2 Laporan	252.921.299	2 Laporan	226.426.858	2 Laporan	124.534.772	8 Laporan	847.447.847
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Laporan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	305.000.000	1 Laporan	305.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	65.000.000	4 Laporan	795.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						64.182.916.420		72.021.858.062		78.721.828.868		79.019.975.109		70.484.254.030		300.247.916.069
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	860 Orang/Bulan	Orang/Bulan		865 Orang/Bulan	63.804.616.420	900 orang/Bulan	70.335.078.062	900 orang/Bulan	77.353.585.868	950orang/Bulan	78.114.250.509	960orang/Bulan	70.000.000.000	3710Orang/Bulan	295.802.914.439



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Dokumen		5 Dokumen	56.250.000	5 Dokumen	211.875.000	5 Dokumen	210.062.500	5 Dokumen	149.727.500	5 Dokumen	82.355.625	20 Dokumen	654.020.625
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Dokumen		3 Dokumen	107.050.000	3 Dokumen	267.755.000	3 Dokumen	279.530.500	3 Dokumen	284.967.100	3 Dokumen	156.731.905	12 Dokumen	988.984.505
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	375.000.000	2 Dokumen	375.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	75.000.000	8 Dokumen	975.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Laporan		3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	245.000.000	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	90.000.000	3 Laporan	45.000.000	12 Laporan	425.000.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Dokumen		3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	280.000.000	3 Dokumen	180.000.000	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	550.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Laporan		18 Laporan	65.000.000	18 Laporan	307.150.000	18 Laporan	278.650.000	18 Laporan	171.030.000	18 Laporan	95.166.500	72 Dokumen	851.996.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.000.000		285.000.000		290.000.000		90.000.000		50.000.000		715.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Orang		5 Orang	25.000.000	7 Orang	285.000.000	8 Orang	290.000.000	9 Orang	90.000.000	10 Orang	50.000.000	34 Orang	715.000.000



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Adiministrasi Umum perangkat Daerah						832.667.600		2.314.434.360		2.257.527.804		2.216.561.153		1.311.346.933		8.099.870.250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Paket		20 Paket	7.000.000	20 Paket	307.700.000	20 Paket	308.470.000	20 Paket	18.634.000	20 Paket	102.487.000	80 Paket	737.291.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 Paket	Paket		12 Paket	160.000.000	12 Paket	476.000.000	12 Paket	493.600.000	12 Paket	425.920.000	17 Paket	234.256.000	48 Paket	1.629.776.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	Paket		2 Paket	15.000.000	2 Paket	315.000.000	2 Paket	168.150.000	2 Paket	39.930.000	2 Paket	21.961.500	8 Paket	545.041.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Dokumen		4 Dokumen	305.628.000	4 Dokumen	586.190.800	4 Dokumen	619.809.888	4 Dokumen	813.581.737	4 Dokumen	447.469.955	16 Dokumen	2.467.052.380



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
					2022		2023		2024		2025	2026				
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Laporan		12 Laporan	345.039.600	12 Laporan	629.543.560	15 Laporan	667.497.916	17 Laporan	918.495.416	20 Laporan	505.172.478	64 Laporan	2.720.709.370
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.341.900.000		20.474.590.000		13.620.549.000		4.562.207.800		1.957.714.290		40.615.061.090
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Unit		1 Unit	650.000.000	1 unit	4.715.000.000	1 unit	4.786.500.000	1 unit	2.730.300.000	1 unit	951.665.000	4 Unit	13.183.465.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Unit		1 Unit	15.000.000	1 unit	3.015.000.000	1 unit	3.015.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	15.000.000	4 Unit	6.075.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit		2 Unit	326.900.000	2 Unit	5.359.590.000	2 Unit	1.395.549.000	2 Unit	870.207.800	2 Unit	478.614.290	8 Unit	8.103.961.090



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	Unit		1 Unit	350.000.000	1 Unit	7.385.000.000	1 Unit	4.423.500.000	1 Unit	931.700.000	1 Unit	512.435.000	4 Unit	13.252.635.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.005.552		563.506.107		578.356.718		915.587.523		212.661.629		2.270.111.977
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan		12 Laporan	135.005.552	12 Laporan	348.506.107	12 Laporan	363.356.718	12 Laporan	359.384.780	12 Laporan	197.661.629	48 Laporan	1.268.909.234
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelngkapan Kantor yang disediakan	0 Laporan	Laporan		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	556.202.743	1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	1.001.202.743



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						340.960.000		875.056.000		9.321.545.727		1.547.743.520		25.352.306.005		37.096.651.252
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Unit		20 Unit	200.960.000	20 unit	421.056.000	20 unit	443.161.600	20 unit	534.958.520	20 unit	294.225.536	80 Unit	1.693.401.656
Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	6 Unit	Unit		6 Unit	95.000.000	6 unit	304.500.000	6 unit	8.623.934.127	6 unit	252.890.000	6 unit	139.089.500	24 unit	9.320.413.627
Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	66 Unit	Unit		66 unit	45.000.000	66 unit	149.500.000	66 unit	254.450.000	66 unit	759.895.000	66 unit	24.918.990.969	264 unit	26.082.835.969



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Peningkatan Pelayanan BLUD						8.000.000.000		8.516.136.258		1.100.000.000		19.000.000.000		10.000.000.000		38.616.136.258
Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	8.000.000.000	1 Unit Kerja	8.516.136.258	1 Unit Kerja	1.100.000.000	1 Unit Kerja	19.000.000.000	1 Unit Kerja	10.000.000.000	5 Unit Kerja	38.616.136.258
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						35.888.969.516		45.218.515.000		45.670.700.000		46.127.407.000		46.588.681.000		183.605.303.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota						26.668.103.891		37.099.868.762		36.938.608.454		37.047.244.110		25.447.650.830		136.533.372.156
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Unit		1 Unit	55.000.000	2 Unit	7.060.500.000	3 Unit	66.550.000	4 Unit	73.205.000	5 Unit	70.525.500	14 Unit	7.270.780.500



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	6 Unit	Unit		6 Unit	1.324.592.000	6 unit	1.457.051.200	6 unit	1.602.756.320	6 unit	1.763.031.952	6 unit	1.939.335.147	24 Unit	6.762.174.619
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Unit		1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	10.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	4 Unit	25.000.000.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	Unit		6 Unit	6.677.473.720	6 unit	3.345.221.092	6 unit	7.066.550.000	6 unit	8.253.634.064	6 unit	7.330.369.197	24 Unit	25.995.774.353
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	Unit		6 Unit	409.151.000	6 unit	1.155.165.039	6 unit	495.072.710	6 unit	7.359.092.502	6 unit	599.037.979	24 Unit	9.608.368.230
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	Unit		4 Unit	2.000.000.000	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	8.242.990.455	6 Unit	3.500.000.000	6 Unit	2.500.000.000	22 Unit	15.742.990.455



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022	2023		2024		2025			2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	Unit		4 Unit	2.000.000.000	3 Unit	6.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	11 Unit	11.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Unit		50 Unit	5.270.366.961	50 Unit	3.797.403.657	50 Unit	4.377.144.023	50 Unit	4.924.823.893	50 Unit	4.216.344.359	200 Unit	17.315.715.932
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional	50 Unit	Unit		60 Unit	64.413.000	60 unit	70.854.300	60 unit	6.118.345.222	60 unit	857.337.003	60 unit	94.307.073	240 unit	7.140.843.598
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 Paket	Paket		3 Paket	1.770.119.780	3 paket	1.947.131.758	3 paket	1.141.844.934	3 paket	2.356.029.427	3 paket	1.091.632.370	17 paket	6.536.638.489



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 Paket	Paket		2 Paket	1.096.987.430	2 paket	266.541.716	2 paket	1.327.354.790	2 paket	1.460.090.269	2 paket	1.106.099.205	8 paket	4.160.085.980
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota						8.975.865.625		7.766.902.238		8.277.091.546		8.535.162.890		20.491.030.169		45.070.186.844
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2755 Orang	Orang		2755 Orang	294.578.000	2810 Orang	210.000.000	2866 Orang	220.500.000	2923 Orang	231.525.000	2981 Orang	243.100.000	11580 Orang	905.125.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2755 Orang	Orang		2755 Orang	1.498.806.000	2810 Orang	282.779.000	2868 Orang	296.917.950	2923 Orang	311.817.848	2981 Orang	327.408.740	11582 Orang	1.218.923.538



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2944 Orang	Orang		2944 Orang	100.000.000	2950 Orang	100.000.000	2954 Orang	100.000.000	2958 Orang	10.000.000	3000 Orang	100.000.000	11862 Orang	310.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8385 Orang	Orang		8385 Orang	92.325.000	8553 Orang	200.000.000	8724 Orang	210.220.500	8898 Orang	231.525.000	9076 Orang	243.100.000	35251 Orang	884.845.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5417 Orang	Orang		5417 Orang	-	5525 Orang	72.000.000	5693 Orang	75.600.000	5807 Orang	79.380.000	5909 Orang	83.350.000	22934 Orang	310.330.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110063 Orang	Orang		110063 Orang	100.000.000	112149 orang	100.000.000	112149 orang	105.000.000	112149 orang	110.000.000	112149 orang	11.570.070.000	461112 orang	11.885.070.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9863 Orang	Orang		9863 Orang	120.000.000	10060 Orang	100.000.000	10261 Orang	105.000.000	10466 Orang	110.250.000	10675 Orang	115.770.000	41462 Orang	431.020.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28568 Orang	Orang		28568 Orang	74.986.200	29307 Orang	87.653.000	30047 Orang	92.035.650	30788 Orang	96.637.433	31529 Orang	101.469.304	121671 Orang	377.795.387
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11242 Orang	Orang		11242 Orang	24.985.000	11533 Orang	96.957.300	11824 Orang	101.805.165	12116 Orang	106.895.423	12407 Orang	112.240.194	47880 Orang	417.898.082



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	245 Orang	Orang		245 Orang	74.899.400	245 Orang	95.389.700	245 Orang	100.159.185	245 Orang	105.167.144	245 Orang	110.425.501	980 Orang	411.141.530
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	651 Orang	Orang		651 Orang	99.954.700	650 Orang	109.950.170	649 Orang	120.945.187	648 Orang	133.039.706	647 Orang	146.343.676	2594 Orang	510.278.739
pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4845 Orang	Orang		4845 Orang	225.001.600	4845 Orang	247.501.760	4845 Orang	272.251.936	4845 Orang	299.477.130	4845 Orang	329.424.843	19380 orang	1.148.655.669
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	588.371.000	2 Dokumen	277.831.000	2 Dokumen	291.750.000	2 Dokumen	306.350.000	2 Dokumen	321.700.000	8 Dokumen	1.197.631.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	110.000.000	22 Dokumen	130.000.000	27 Dokumen	150.000.000	35 Dokumen	170.000.000	99 Dokumen	560.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	Dokumen		20 Dokumen	450.000.000	25 Dokumen	495.000.000	30 Dokumen	598.950.000	35 Dokumen	598.950.000	40 Dokumen	658.845.000	130 Dokumen	2.351.745.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	91.066.000	1 Dokumen	100.172.600	1 Dokumen	110.189.860	1 Dokumen	121.208.846	1 Dokumen	133.329.731	4 Dokumen	464.901.037
pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	10 Dokumen	Dokumen		10 Dokumen	556.338.000	10 Dokumen	556.338.000	10 Dokumen	556.338.000	10 Dokumen	556.338.000	10 Dokumen	556.338.000	40 Dokumen	2.225.352.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0 Orang	Orang		600 Orang	100.000.000	600 Orang	110.000.000	600 Orang	115.000.000	600 Orang	120.000.000	600 Orang	120.000.000	2400 Orang	465.000.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAFZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43 Orang	Dokumen		43 Orang	84.500.000	43 Orang	83.999.900	43 Orang	88.199.895	43 Orang	92.609.890	43 Orang	97.240.384	172 orang	362.050.069
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	129 Orang	Dokumen		129 Orang	169.996.200	129 Orang	250.000.000	129 Orang	262.500.000	129 Orang	275.625.000	129 Orang	289.406.250	516 orang	1.077.531.250
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kritis Kesehatan dan Pasca Kritis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	382.732.000	1 Dokumen	382.732.000	1 Dokumen	382.732.000	1 Dokumen	382.732.000	1 Dokumen	382.732.000	4 Dokumen	1.530.928.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayannya kesehatan PM dan PTM	12 Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	199.999.825	12 Dokumen	219.999.808	12 Dokumen	241.999.788	12 Dokumen	266.199.767	1 Dokumen	292.819.744	48 Dokumen	1.021.019.107
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	1.210.125.000	1 Dokumen	1.210.125.000	1 Dokumen	1.210.125.000	1 Dokumen	1.210.125.000	1 Dokumen	1.210.125.000	4 Dokumen	4.840.500.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAFZA di Yasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	Orang		-	-	-	-	360 Orang	100.000.000	360 Orang	110.000.000	360 Orang	115.000.000	1080 Orang	325.000.000
Penelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15 Dokumen	Dokumen		20 Dokumen	200.000.000	25 Dokumen	220.000.000	30 Dokumen	240.000.000	35 Dokumen	260.000.000	40 Dokumen	280.000.000	130 Dokumen	1.000.000.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	449.488.700	1 Dokumen	449.488.700	1 Dokumen	449.488.700	1 Dokumen	449.488.700	1 Dokumen	449.488.700	4 Dokumen	1.797.954.800
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit	Unit		14 Unit	912.713.000	14 Unit	1.003.984.300	14 Unit	1.104.382.730	14 Unit	1.214.821.003	14 Unit	1.336.303.103	56 Unit	4.659.491.136



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Investigasi Awal Kejadian tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	22 Laporan	Laporan		22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	20.000.000	88 Laporan	80.000.000
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50 Dokumen	Dokumen		50 Dokumen	325.000.000	50 Dokumen	325.000.000	50 Dokumen	325.000.000	50 Dokumen	325.000.000	50 Dokumen	325.000.000	200 Dokumen	1.300.000.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 Unit	Unit		1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	4 Unit	1.000.000.000



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						160.000.000		240.744.000		305.000.000		345.000.000		400.000.000		1.290.744.000
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Dokumen		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	27.499.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 Dokumen	152.499.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Dokumen		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	93.245.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	150.000.000	4 Dokumen	493.245.000
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	14 Unit	Unit		14 unit	100.000.000	14 unit	120.000.000	14 unit	150.000.000	14 unit	175.000.000	14 unit	200.000.000	56 Unit	645.000.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota						85.000.000		111.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		711.000.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan dan ditindaklanjuti perizinannya	15 Unit	Unit		15 unit	35.000.000	15 unit	36.000.000	15 unit	50.000.000	15 unit	75.000.000	15 unit	100.000.000	60 Unit	261.000.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INN) Layanan Kesehatan	14 Unit	Unit		14 Unit	50.000.000	14 unit	75.000.000	14 unit	100.000.000	14 unit	125.000.000	14 unit	150.000.000	56 Unit	450.000.000



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						614.069.000		614.068.300		620.210.000		626.412.000		632.676.000		2.493.367.080
Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota						44.999.200		50.000.000		55.000.000		80.000.000		60.000.000		245.000.000
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Dokumen		1 dokumen	44.999.200	1 dokumen	50.000.000	14 Puskesmas	55.000.000	14 Puskesmas	80.000.000	14 Puskesmas	60.000.000	4 Dokumen	245.000.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM diwilayah Kabpten/Kota						234.000.000		228.999.300		236.650.000		229.892.000		230.524.000		926.065.300
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang Memenuhi Standar di (Fasvankes)	1000 orang	Orang		1000 orang	204.000.000	1000 orang	195.999.300	1000 orang	200.350.000	1000 orang	200.524.000	1000 orang	200.524.000	4000 orang	797.397.300



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17 Dokumen	Dokumen		17 Dokumen	30.000.000	17 Dokumen	33.000.000	17 Dokumen	36.300.000	17 Dokumen	29.368.000	17 Dokumen	30.000.000	68 Dokumen	128.668.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDK Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota						335.069.800		335.069.000		328.560.000		316.520.000		342.152.000		1.322.301.780
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensi	1000 orang	1000 orang		1000 orang	335.069.800	1000 orang	335.069.000		328.560.000		316.520.000		342.152.000	4000 orang	1.322.301.780



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman						1.073.517.200		629.525.000		635.820.000		642.178.000		648.600.000		2.556.123.000
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						401.676.200		241.741.950		251.338.202		243.949.772		201.086.310		938.116.234
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Dokumen		1 dokumen	51.676.200	1 dokumen	46.843.820	1 dokumen	62.528.202	1 dokumen	68.781.022	1 dokumen	75.659.124	4 dokumen	253.812.168



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam Rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal	47 Sarana	Sarana		47 sarana	175.000.000	48 sarana	61.148.130	51 sarana	59.485.000	55 sarana	102.584.375	58 sarana	62.713.593	212 sarana	285.931.098
Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang Memenuhi Komitmen Izin	47 Sarana	Sarana		47 sarana	175.000.000	48 sarana	133.750.000	51 sarana	129.325.000	55 sarana	72.584.375	58 sarana	62.713.593	212 sarana	398.372.968



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga						349.682.000		267.166.100		252.809.001		106.800.624		125.040.656		751.816.381
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	239 Dokumen	Dokumen		246 Dokumen	174.841.000	284 Dokumen	83.583.050	307 Dokumen	60.046.799	337 Dokumen	52.500.312	357 Dokumen	62.520.328	1285 Dokumen	258.650.489



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	239 Dokumen	Dokumen		246 Dokumen	174.841.000	284 Dokumen	183.583.050	307 Dokumen	192.762.202	337 Dokumen	54.300.312	357 Dokumen	62.520.328	1285 Dokumen	493.165.892
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sbagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						75.159.000		48.916.950		62.802.797		87.005.937		60.840.334		259.566.018



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi. Untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di Produksi oleh Industri Rumah Tangga	68 Dokumen			71 Dokumen	75.159.000	73 Dokumen	48.916.950	77 Dokumen	62.802.797	82 Dokumen	87.005.937	86 Dokumen	60.840.334	318 Dokumen	259.566.018



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						247.000.000		71.700.000		68.870.000		204.421.667		261.632.700		606.624.367
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan/restoran dan depot air minum(DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan/restoran dan depot minum(DAM)	55 Dokumen			Dokumen	247.000.000	70 Dokumen	71.700.000	85 Dokumen	68.870.000	100 Dokumen	204.421.667	120 Dokumen	261.632.700	375 Dokumen	606.624.367



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						898.979.200		1.069.181.000		1.079.873.000		1.090.672.000		1.101.578.000		4.341.304.000
Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran srta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota		7 Kecamatan	kecamatan		7 Kecamatan	401.011.000	8 Kecamatan	441.112.100	9 Kecamatan	485.223.310	10 Kecamatan	533.745.641	11 Kecamatan	587.120.205	11 Kecamatan	2.047.201.256
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10 Dokumen			10 Dokumen	401.011.000	12 Dokumen	441.112.100	14 Dokumen	485.223.310	16 Dokumen	533.745.641	18 Dokumen	587.120.205	60 Dokumen	2.047.201.256



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal tahun perencanaan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target kinerja program dan kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah KabupKota						447.968.200		492.765.020		454.345.807		481.926.359		434.457.795		1.863.494.981
Penyelenggara n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen			7 Dokumen	447.968.200	8 Dokumen	492.765.020	9 Dokumen	454.345.807	10 Dokumen	481.926.359	11 Dokumen	434.457.795	38 Dokumen	1.863.494.981
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000		135.303.880		140.303.883		75.000.000		80.000.000		430.607.763
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upava	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upava	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	135.303.880	1 Dokumen	140.303.883	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	430.607.763



Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jl. Raya Padang Panjang
Telp/Fax. (0739) 21797
Email : dinaskesehatan.kab@gmail.com



Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Kesehatan Bersumber Daya Kesehatan															
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi akan hasil yang diharapkan dalam kurun waktu perencanaan, dalam hal ini kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana Peraturan Daerah Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama poin yang termaktub dalam misi pertama RPJMD yaitu :

Misi 1: “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing “.

Tujuan dari misi tersebut adalah : **‘Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat’.**

Adapun sasaran dari tujuan misi di atas antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan akses dan mutu sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit yang berkualitas)
3. Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja.



Tabel T.C 2.8

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada RPJMD

Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 Kelahiran Hidup)	/1000 KH	/1000 KH	18,6	17,6	16	15	14	Seksi Kia-Gizi	Bidang Kesmas
				2. Angka kematian Ibu (AKI) (per 100.000 Kelahiran Hidup)	/ 100.000 KH	/100.000	205	194	183	172	161	Seksi Kia-Gizi	Bidang Kesmas



No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
				3. Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dari Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Jumlah Desa UCI/Jumlah Desa	%	93	93	93	93	93	seksi Surveilan dan Imuniasi	Bidang P2P
					2. Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Ada/Jumlah Kasus Penyakit Menular yang ditangani	%	100	100	100	100	100	Seksi P2PM	Bidang P2P
					3. Jumlah Desa dengan Posbindu PTM/Jumlah Desa	%	100	100	100	100	100	Seksi PTM dan Keswa	Bidang P2P
				4. Persentase Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Penduduk dengan Jaminan Kesehatan/Jmlh Penduduk	orang	170.440					Seksi Yankes	Bidang Yankes



No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
					2. Jumlah Fasyankes terstandar/Jumlah Fasyankes	unit	16	16	16	16	16	Seksi Yankes	Bidang Yankes
				5.Persentase Meningkatnya Masyarakat terhadap Lingkungan dan Pola PHBS	1. Persentase Desa Stop BABS	%	62	80				Seksi Kesling Kesjaor	bidang kesmas
					2. Pesentase Desa yang Melaksanakan PHBS dan Germas	%	80	85	90	95	100	Seksi Promkes	Bidang Kesmas



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati yang sudah ditetapkan melalui Perda RPJMD tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan mengembangkan program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perubahan Rencana Strategis menjadi pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahunan (2021 s.d 2026), agar rencana strategi dapat dijadikan pedoman rencana kerja maka perlu ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang memuat penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, Tujuan, Sasaran, Strategi (Kebijakan, Program dan Kegiatan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis, Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi dengan rancana aksi kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pemantauan terhadap penjabaran Perubahan Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
3. Perubana Rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.



4. Dinas Kesehatan Provinsi, UPTD agar mensosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan advokasi kepada para pemangku kepentingan, agar secara sungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

LAMPIRAN



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
DINAS KESEHATAN							114.484.778.227
1. Mendukung Terlaksananya Reformasi Birokrasi				Nilai Evaluasi SAKIP,Persentase Tata kelola Keuangan Sesuai SAP,Persentase Capaian Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	
	1. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	85.734.814
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	110.000.000
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	110.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	85.058.925
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	50.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	860 orang/bulan	865 orang/bulan	63.804.616.420
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	5 dokumen	56.250.000
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	107.050.000
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan	45.000.000
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	3 dokumen	30.000.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	65.000.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	5 orang	25.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di sediakan	20 Paket	20 Paket	7.000.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	160.000.000
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang di Sediakan	4 dokumen	4 dokumen	305.628.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	345.039.600
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	650.000.000
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan	0 unit	1 unit	15.000.000
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	1 unit	2 unit	326.900.000
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	350.000.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Listrik yang di sediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.005.552
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sediakan	0 Laporan	1 Laporan	10.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di bayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	200.960.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara /di rehabilitasi	6 Unit	6 Unit	95.000.000
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau banguan lainya yang di pelihara/di rehabilitasi	66 Unit	66 Unit	45.000.000
		X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				
		X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang meyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8.000.000.000
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				Angka Harapan Hidup	19 %	18.6 %	
	1. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	55.000.000
		1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Yang Di Bangun	6 Unit	6 Unit	1.324.592.000
		1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang di tingkatkan sarana,prasarana,alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 banding seribu	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pukesmas Yang Di Tingkatkan Sarana,Prasarana,Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar	6 Unit	6 Unit	6.677.473.720
		1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana,Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai standar	6 Unit	6 Unit	409.151.000
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana,prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	3 Unit	4 Unit	2.000.000.000
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana,prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh pukesmas	3 Unit	4 Unit	2.000.000.000
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Pelayan Kesehatan Yang di Sediakan	50 Unit	50 Unit	5.270.366.961
		1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintance Center	50 Unit	60 Unit	64.413.000
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Vaksin yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.770.119.780
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.096.987.430
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2755 Orang	2755 Orang	294.578.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2755 Orang	2755 Orang	1.498.806.000
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2944 Orang	2944 Orang	100.000.000
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8385 Orang	8385 Orang	92.325.000
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5417 Orang	5417 Orang	0
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110063 Orang	110063 Orang	100.000.000
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9863 Orang	9863 Orang	120.000.000
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28568 Orang	28568 Orang	74.986.200
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11242 Orang	11242 Orang	24.985.000
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	245 Orang	245 Orang	74.899.400
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	651 Orang	651 Orang	99.954.700
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan layanan sesuai standar	4845 Orang	4845 Orang	225.001.600
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	588.371.000
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	10 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	20 Dokumen	450.000.000
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	15 dokumen	20 dokumen	450.000.000
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	91.066.000
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan survailens kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	556.338.000
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) di Fasyankes dan sekolah	0 0	600 Orang	100.000.000
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	43 Orang	43 Orang	84.500.000
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	129 Dokumen	129 Dokumen	169.996.200
		1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	382.732.000
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	12 Dokumen	199.999.825
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.210.125.000
		1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (FASYANKES) dan sekolah	0 0	0 0	0
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	15 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	449.488.700

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	14 Unit	14 Unit	912.713.000
		1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil insvestigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	22 Laporan	22 Laporan	200.000.000
		1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	50 Dokumen	50 Dokumen	325.000.000
		1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Publik safety senter (PSC 119) ketersediaan terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan kegawat daruratan terpadu(SPGDT)	0 0	1 Unit	250.000.000
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100.000.000
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	15 Unit	15 Unit	35.000.000
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INN) layanan kesehatan	14 Unit	14 Unit	50.000.000
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				
		1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	44.999.200
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumberdaya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	1000 Orang	1000 Orang	204.000.000
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasilpembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	17 Dokumen	17 Dokumen	30.000.000
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompentensinya	1000 Orang	1000 Orang	335.069.800
	2. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usah Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	51.676.200
		1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT	47 Sarana	47 Sarana	175.000.000
		1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi Komitmen Izin	47 Sarana	47 Sarana	175.000.000
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
		1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas I tertentu perusahaan rumah tangga	239 Dokumen	246 Dokumen	174.841.000
		1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	239 Dokumen	246 Dokumen	174.841.000
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga	68 Dokumen	71 Dokumen	75.159.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
		1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	55 Dokumen	55 Dokumen	247.000.000
	3. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10 Dokumen	10 Dokumen	401.011.000
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen	7 Dokumen	447.968.200
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
DINAS KESEHATAN							154.454.744.080		155.999.292.000		157.559.284.000		159.134.877.000		627.148.197.080	
1. Mendukung Terlaksananya Reformasi Birokrasi																
	1. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					106.923.454.000		107.992.689.000		109.072.615.000		110.163.342.000		434.152.100.000
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.872.873.213		2.102.880.883		1.720.539.895		795.059.113		6.491.353.104
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	294.308.295	2 dokumen	303.739.125	2 dokumen	364.113.037	2 dokumen	125.524.341	8 dokumen	1.087.684.798
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	150.000.000	4 dokumen	1.200.000.000
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	321.220.459	2 dokumen	220.000.000	2 dokumen	110.000.000	8 dokumen	861.220.459
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	220.000.000	2 dokumen	110.000.000	8 dokumen	750.000.000
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	260.000.000	2 dokumen	360.000.000	2 dokumen	220.000.000	2 dokumen	110.000.000	8 dokumen	950.000.000
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	243.564.918	2 laporan	252.921.299	2 laporan	226.426.858	2 laporan	124.534.772	8 laporan	847.447.847
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	305.000.000	1 laporan	305.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	65.000.000	4 laporan	795.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					72.021.858.062		78.721.828.868		79.019.975.109		70.484.254.030		300.247.916.069

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjngan PNS	860 orang/bulan	900 orang/bulan	70.335.078.062	900 orang/bulan	77.353.585.868	950 orang/bulan	78.114.250.509	960 orang/bulan	70.000.000.000	3710 orang/bulan	295.802.914.439
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	5 dokumen	211.875.000	5 dokumen	210.062.500	5 dokumen	149.727.500	5 dokumen	82.355.625	20 dokumen	654.020.625
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	267.755.000	3 dokumen	279.530.500	3 dokumen	284.967.100	3 dokumen	156.731.905	12 dokumen	988.984.505
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	75.000.000	8 dokumen	975.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan	245.000.000	3 laporan	45.000.000	3 laporan	90.000.000	3 laporan	45.000.000	12 laporan	425.000.000
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tangapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	3 dokumen	280.000.000	3 dokumen	180.000.000	3 dokumen	60.000.000	3 dokumen	30.000.000	12 dokumen	550.000.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan	18 laporan	18 laporan	307.150.000	18 laporan	278.650.000	18 laporan	171.030.000	18 laporan	95.166.500	72 laporan	851.996.500
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					285.000.000		290.000.000		90.000.000		50.000.000		715.000.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 orang	7 orang	285.000.000	8 orang	290.000.000	9 orang	90.000.000	10 orang	50.000.000	34 orang	715.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.314.434.360		2.257.527.804		2.216.561.153		1.311.346.933		8.099.870.250
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di sediakan	Tersedianya Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	20 Paket	307.700.000	20 Paket	308.470.000	20 Paket	18.634.000	20 Paket	102.487.000	80 Paket	737.291.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	476.000.000	12 Paket	493.600.000	12 Paket	425.920.000	12 Paket	234.256.000	48 Paket	1.629.776.000
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	315.000.000	2 Paket	168.150.000	2 Paket	39.930.000	2 Paket	21.961.500	8 Paket	545.041.500
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di Sediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 dokumen	4 dokumen	586.190.800	4 dokumen	619.809.888	4 dokumen	813.581.737	4 dokumen	447.469.955	16 dokumen	2.467.052.380
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	629.543.560	15 Laporan	667.497.916	17 Laporan	918.495.416	20 Laporan	505.172.478	64 Laporan	2.720.709.370

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.474.590.000		13.620.549.000		4.562.207.800		1.957.714.290		40.615.061.090
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan yang disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	4.715.000.000	1 unit	4.786.500.000	1 unit	2.730.300.000	1 unit	951.665.000	4 unit	13.183.465.000
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan	Tersedianya Mebel	0 unit	1 unit	3.015.000.000	1 unit	3.015.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	15.000.000	4 unit	6.075.000.000
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	2 unit	5.359.590.000	2 unit	1.395.549.000	2 unit	870.207.800	2 unit	478.614.290	8 unit	8.103.961.090
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	7.385.000.000	1 Unit	4.423.500.000	1 Unit	931.700.000	1 Unit	512.435.000	4 Unit	13.252.635.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					563.506.107		578.356.718		915.587.523		212.661.629		2.270.111.977
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Listrik yang di sediakan	Tersediaanya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	348.506.107	12 Laporan	363.356.718	12 Laporan	359.384.780	12 Laporan	197.661.629	48 Laporan	1.268.909.234
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	556.202.743	1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	1.001.202.743
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					875.056.000		9.321.545.727		1.547.743.520		25.352.306.005		37.096.651.252
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di bayarkan Pajaknya	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	20 Unit	421.056.000	20 Unit	443.161.600	20 Unit	534.958.520	20 Unit	294.225.536	80 Unit	1.693.401.656
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara /di rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	304.500.000	6 Unit	8.623.934.127	6 Unit	252.890.000	6 Unit	139.089.500	24 Unit	9.320.413.627
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	66 Unit	66 Unit	149.500.000	66 Unit	254.450.000	66 Unit	759.895.000	66 Unit	24.918.990.969	264 Unit	26.082.835.969
		X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					8.516.136.258		1.100.000.000		19.000.000.000		10.000.000.000		38.616.136.258
		X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang meyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8.516.136.258	1 Unit Kerja	1.100.000.000	1 Unit Kerja	19.000.000.000	1 Unit Kerja	10.000.000.000	4 Unit Kerja	38.616.136.258

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
	1. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan															
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					45.218.515.000		45.670.700.000		46.127.407.000		46.588.681.000		183.605.303.000
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					37.099.868.762		36.938.608.454		37.047.244.110		25.447.650.830		136.533.372.156
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Yang Dibangun	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas)	1 Unit	2 Unit	7.060.500.000	3 Unit	66.550.000	4 Unit	73.205.000	5 Unit	70.525.500	14 Unit	7.270.780.500
		1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Yang Di Bangun	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	6 Unit	6 Unit	1.457.051.200	6 Unit	1.602.756.320	6 Unit	1.763.031.952	6 Unit	1.939.335.147	24 Unit	6.762.174.619
		1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang di tingkatkan sarana,prasarana,alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 banding seribu	Tersediannya rumah sakit yang di tingkatkan sarana,prasarana,alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 banding seribu	1 Unit	1 Unit	10.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	4 Unit	25.000.000.000
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pukesmas Yang Di Tingkatkan Sarana,Prasarana,Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar	Tersediannya Pukesmas yang di Tingkatkan Sarana,Prasarana,Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar	6 Unit	6 Unit	3.345.221.092	6 Unit	7.066.550.000	6 Unit	8.253.634.064	6 Unit	7.330.369.197	24 Unit	25.995.774.353
		1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana,Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai standar	Terlaksanannya Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya Sesuai Standar	6 Unit	6 Unit	1.155.165.039	6 Unit	495.072.710	6 Unit	7.359.092.502	6 Unit	599.037.979	24 Unit	9.608.368.230
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana,prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Tersediannya sarana,prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	3 Unit	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	8.242.990.455	6 Unit	3.500.000.000	6 Unit	2.500.000.000	22 Unit	15.742.990.455
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana,prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh pukesmas	Tersediannya sarana,prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh pukesmas	3 Unit	3 Unit	6.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	11 Unit	11.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang di Sediakan	Tersediannya Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Unit	50 Unit	3.797.403.657	50 Unit	4.377.144.023	50 Unit	4.924.823.893	50 Unit	4.216.344.359	200 Unit	17.315.715.932
		1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintance Center	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintance Center	50 Unit	60 Unit	70.854.300	60 Unit	6.118.345.222	60 Unit	857.337.003	60 Unit	94.307.073	240 Unit	7.140.843.598
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Vaksin yang Disediakan	Tersediannya Obat dan Vaksin	3 Paket	3 Paket	1.947.131.758	3 Paket	1.141.844.934	3 Paket	2.356.029.427	3 Paket	1.091.632.370	12 Paket	6.536.638.489
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Tersediannya Bahan Habis pakai	2 Paket	2 Paket	266.541.716	2 Paket	1.327.354.790	2 Paket	1.460.090.269	2 Paket	1.106.099.205	8 Paket	4.160.085.980
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					7.766.902.238		8.277.091.546		8.535.162.890		20.491.030.170		45.070.186.844
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai standar	2755 Orang	2810 Orang	210.000.000	2866 Orang	220.500.000	2923 Orang	231.525.000	2981 Orang	243.100.000	11580 Orang	905.125.000
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terkelolanya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	2755 Orang	2810 Orang	282.779.000	2868 Orang	296.917.950	2923 Orang	311.817.848	2981 Orang	327.408.740	11582 Orang	1.218.923.538
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Terkelolanya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	2944 Orang	2950 Orang	100.000.000	2954 Orang	100.000.000	2958 Orang	10.000.000	3000 Orang	100.000.000	11862 Orang	310.000.000
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terkelolanya pelayanan kesehatan balita sesuai standar	8385 Orang	8553 Orang	200.000.000	8724 Orang	210.220.500	8898 Orang	231.525.000	9076 Orang	243.100.000	35251 Orang	884.845.500
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terkelolanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	5417 Orang	5525 Orang	72.000.000	5693 Orang	75.600.000	5807 Orang	79.380.000	5909 Orang	83.350.000	22934 Orang	310.330.000
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	110063 Orang	112149 Orang	100.000.000	114235 Orang	105.000.000	116321 Orang	110.000.000	118407 Orang	11.570.070.000	461112 Orang	11.885.070.000
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	9863 Orang	10060 Orang	100.000.000	10261 Orang	105.000.000	10466 Orang	110.250.000	10675 Orang	115.770.000	41462 Orang	431.020.000
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	28568 Orang	29307 Orang	87.653.000	30047 Orang	92.035.650	30788 Orang	96.637.433	31529 Orang	101.469.304	121671 Orang	377.795.387
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar	11242 Orang	11533 Orang	96.957.300	11824 Orang	101.805.165	12116 Orang	106.895.423	12407 Orang	112.240.194	47880 Orang	417.898.082

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	245 Orang	245 Orang	95.389.700	245 Orang	100.159.185	245 Orang	105.167.144	245 Orang	110.425.501	980 Orang	411.141.530
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis sesuai standar	651 Orang	650 Orang	109.950.170	649 Orang	120.945.187	648 Orang	133.039.706	647 Orang	146.343.676	2594 Orang	510.278.739
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan layanan sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan pelayanan bagi orang terduga HIV sesuai standar	4845 Orang	4845 Orang	247.501.760	4845 Orang	272.251.936	4845 Orang	299.477.130	4845 Orang	329.424.843	19380 Orang	1.148.655.669
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	277.831.000	2 Dokumen	291.750.000	2 Dokumen	306.350.000	2 Dokumen	321.700.000	8 Dokumen	1.197.631.000
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	10 Dokumen	15 Dokumen	110.000.000	22 Dokumen	130.000.000	27 Dokumen	150.000.000	35 Dokumen	170.000.000	99 Dokumen	560.000.000
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	25 Dokumen	495.000.000	30 Dokumen	598.950.000	35 Dokumen	598.950.000	40 Dokumen	658.845.000	130 Dokumen	2.351.745.000
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Terlaksananya pengelolaan layanan promosi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.172.600	1 Dokumen	110.189.860	1 Dokumen	121.208.846	1 Dokumen	133.329.731	4 Dokumen	464.901.037
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan survailens kesehatan	Terlaksananya pengelolaan survailens kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	556.338.000	10 Dokumen	556.338.000	10 Dokumen	556.338.000	10 Dokumen	556.338.000	40 Dokumen	2.225.352.000
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0 Orang	600 Orang	110.000.000	600 Orang	115.000.000	600 Orang	120.000.000	600 Orang	120.000.000	2400 Orang	465.000.000
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA	43 Orang	43 Orang	83.999.900	43 Orang	88.199.895	43 Orang	92.609.890	43 Orang	97.240.384	172 Orang	362.050.069
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	129 Dokumen	129 Dokumen	250.000.000	129 Dokumen	262.500.000	129 Dokumen	275.625.000	129 Dokumen	289.406.250	516 Dokumen	1.077.531.250
		1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya pengurangan risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Terlaksananya pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	382.732.000	1 Dokumen	382.732.000	1 Dokumen	382.732.000	1 Dokumen	382.732.000	4 Dokumen	1.530.928.000
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	12 Dokumen	219.999.808	12 Dokumen	241.999.788	12 Dokumen	266.199.767	12 Dokumen	292.819.744	48 Dokumen	1.021.019.107
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.210.125.000	1 Dokumen	1.210.125.000	1 Dokumen	1.210.125.000	1 Dokumen	1.210.125.000	4 Dokumen	4.840.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Terlaksananya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	0 Orang	0	360 Orang	100.000.000	360 Orang	110.000.000	360 Orang	115.000.000	1080 Orang	325.000.000
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Terselenggaranya kabupaten/kota sehat	15 Dokumen	25 Dokumen	220.000.000	30 Dokumen	240.000.000	35 Dokumen	260.000.000	40 Dokumen	280.000.000	130 Dokumen	1.000.000.000
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Tersediannya Operasional pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	449.488.700	1 Dokumen	449.488.700	1 Dokumen	449.488.700	1 Dokumen	449.488.700	4 Dokumen	1.797.954.800
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Terlaksananya akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	14 Unit	14 Unit	1.003.984.300	14 Unit	1.104.382.730	14 Unit	1.214.821.003	14 Unit	1.336.303.103	56 Unit	4.659.491.136
		1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil insvestigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	Terlaksananya investigasi awal kejadian tidak di harapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	22 Laporan	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	20.000.000	88 Laporan	80.000.000
		1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Terlaksananya kewaspadaan dini dan respon wabah	50 Dokumen	50 Dokumen	325.000.000	50 Dokumen	325.000.000	50 Dokumen	325.000.000	50 Dokumen	325.000.000	200 Dokumen	1.300.000.000
		1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah public Safety Center (PSC119) Tersediaan, Terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Tersedia dan rerkelolanya public safety center (PSC119) yang terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	0 Unit	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	4 Unit	1.000.000.000
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					240.744.000		305.000.000		345.000.000		400.000.000		1.290.744.000
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.499.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	152.499.000
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	93.245.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	493.245.000
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	Tersediannya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	14 Unit	14 Unit	120.000.000	14 Unit	150.000.000	14 Unit	175.000.000	14 Unit	200.000.000	56 Unit	645.000.000
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					111.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		711.000.000
		1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan,di awasi dan ditindak lanjuti perizinannya	Tersediannya rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan,diawasi dan di tindaklanjuti perizinannya	15 Unit	15 Unit	36.000.000	15 Unit	50.000.000	15 Unit	75.000.000	15 Unit	100.000.000	60 Unit	261.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INN) layanan kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INN)	14 Unit	14 Unit	75.000.000	14 Unit	100.000.000	14 Unit	125.000.000	14 Unit	150.000.000	56 Unit	450.000.000
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					614.069.080		620.210.000		626.412.000		632.676.000		2.493.367.080
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					50.000.000		55.000.000		80.000.000		60.000.000		245.000.000
		1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	Terlaksananya pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	245.000.000
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					228.999.300		236.650.000		229.892.000		230.524.000		926.065.300
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumberdaya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Orang	1000 Orang	195.999.300	1000 Orang	200.350.000	1000 Orang	200.524.000	1000 Orang	200.524.000	4000 Orang	797.397.300
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasilpembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	17 Dokumen	17 Dokumen	33.000.000	17 Dokumen	36.300.000	17 Dokumen	29.368.000	17 Dokumen	30.000.000	68 Dokumen	128.668.000
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					335.069.780		328.560.000		316.520.000		342.152.000		1.322.301.780
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	1000 Orang	335.069.780	1000 Orang	328.560.000	1000 Orang	316.520.000	1000 Orang	342.152.000	4000 Orang	1.322.301.780
	2. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan															
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					629.525.000		635.820.000		642.178.000		648.600.000		2.556.123.000
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					241.741.950		251.338.202		243.949.772		201.086.310		938.116.234

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usah Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengendalian dan npengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	46.843.820	1 Dokumen	62.528.202	1 Dokumen	68.781.022	1 Dokumen	75.659.124	4 Dokumen	253.812.168
		1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	47 Sarana	48 Sarana	61.148.130	51 Sarana	59.485.000	55 Sarana	102.584.375	58 Sarana	62.713.593	212 Sarana	285.931.098
		1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi Komitmen Izin	Terpenuhi Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	47 Sarana	48 Sarana	133.750.000	51 Sarana	129.325.000	55 Sarana	72.584.375	58 Sarana	62.713.593	212 Sarana	398.372.968
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					267.166.100		252.809.001		106.800.624		125.040.656		751.816.381
		1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas I tertentu perusahaan rumah tangga	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	239 Dokumen	284 Dokumen	83.583.050	307 Dokumen	60.046.799	337 Dokumen	52.500.312	357 Dokumen	62.520.328	1285 Dokumen	258.650.489
		1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	239 Dokumen	284 Dokumen	183.583.050	307 Dokumen	192.762.202	337 Dokumen	54.300.312	357 Dokumen	62.520.328	1285 Dokumen	493.165.892
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					48.916.950		62.802.797		87.005.937		60.840.334		259.566.018

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu dokumen yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.	68 Dokumen	73 Dokumen	48.916.950	77 Dokumen	62.802.797	82 Dokumen	87.005.937	86 Dokumen	60.840.334	318 Dokumen	259.566.018
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					71.700.000		68.870.000		204.421.667		261.632.700		606.624.367
		1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55 Dokumen	70 Dokumen	71.700.000	85 Dokumen	68.870.000	100 Dokumen	204.421.667	120 Dokumen	261.632.700	375 Dokumen	606.624.367
	3. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan															
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.069.181.000		1.079.873.000		1.090.672.000		1.101.578.000		4.341.304.000
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					441.112.100		485.223.310		533.745.641		587.120.205		2.047.201.256
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10 Dokumen	12 Dokumen	441.112.100	14 Dokumen	485.223.310	16 Dokumen	533.745.641	18 Dokumen	587.120.205	60 Dokumen	2.047.201.256
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					492.765.020		454.345.807		481.926.359		434.457.795		1.863.494.981
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen	8 Dokumen	492.765.020	9 Dokumen	454.345.807	10 Dokumen	481.926.359	11 Dokumen	434.457.795	38 Dokumen	1.863.494.981
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					135.303.880		140.303.883		75.000.000		80.000.000		430.607.763

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	135.303.880	1 Dokumen	140.303.883	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	430.607.763